PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI, INVESTASI ASING, DAU DAN PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Fitria Ayu Wijayanti

Nomer Mahasiswa : 14313234

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

2018

Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi, Investasi Asing, DAU Dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Fitria Ayu Wijayanti

Nomer Mahasiswa : 14313234

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan skripsi ini telah ditulis tangan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Penulis,

Fitria Ayu Wijayanti

PENGESAHAN SKRIPSI

Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi, Investasi Asing, DAU Dan Pendidikan

Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Nama	: Fitria Ayu Wijayanti
Nomer Mahasiswa	: 14313234
Program Studi	: Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Akhsyim Afandi,Drs.MA.Ec.,Ph,D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI, INVESTASI ASING, DAU, DAN PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN

Disusun Oleh : **FITRIA AYU WIJAYANTI**

Nomor Mahasiswa : **14313234**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 6 Februari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D. .....

Penguji : Diana Wijayanti, Dra., M.Si. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS EKONOMI

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(QS Al Insyirah: 6-8)

"Janganlah meminta bukti bahwa doamu akan dijawab oleh Tuhan, tapi buktikanlah kesungguhan dari doamu"

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."

(Aristoteles)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan."(QS.Al-Mujadalah:11)

"Live with passion today and everyday!"

"The past can hurt. But the way I see it,you can either run from it, or learn from it." (The Lion King)

You only live once, but if you do it right, once is enough (Mae West)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk:

1. Terima kasih kepada Allah SWT
2. Terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW
3. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus.
4. Bapak Akhsyim Affandi selaku dosen pembimbing sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Adik tercinta Saya
6. Teman-teman terbaik saya Luli, Memey, Nia, Nindy, Wulan, terimakasih selalu ada dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan dan Doanya, semoga kita selalu dalam rahmat-Nya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb,

Alhamdulillahirabil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Perubahan Struktur Ekonomi, Investasi Asing, DAU dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan"** dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dengan junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya diyaumil akhir nanti.

Penulis menyadari terselesaikan penulisan skripsi ini berkat dukungan motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan yang dilimpahkan-Nya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr.Dwiprapto Agus Hardjito,M.S.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

3. Bapak Akhsyim Afandi Drs.MA.Ec.,Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan,dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas segala ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selamaini kepada penulis.
5. Kepada orang tuaku Bpk. Eko Wiharyanto dan Ibu Frida Yuningsih yang selalu memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang yang tak terhingga dan doa yang tiada henti agar penulis menjadi anak yang taat agama dan menjdai kebanggan keluarga.
6. Sahabat-sahabatku tercinta Luli, Meme, Nia, Nindy dan Wulan yang telah memberikan dukungan dan semangat semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamalaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
PENGESAHAN UJIAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 6
1.3.1 Tujuan Penelitian 6
1.3.2 Manfaat Penelitian 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA 8
2.1 Kajian Pustaka 8
2.2 Landasan Teori 18
2.2.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan 18
2.2.2 Penyebab Terjadinya Ketimpangan Distribusi Pendapatan 18
2.2.3 Pengaruh PAD dengan Ketimpangan Pendapatan 19
2.2.4 Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Ketimpangan Pendapatan 20
2.2.5 Pengaruh Belanja Modal dengan Ketimpangan Pendapatan 21
2.2.6 Pengaruh Sektor Pertanian dengan Ketimpangan Pendapatan..... 22
2.2.7 Pengaruh Sektor Manufaktur dengan Ketimpangan Pendapatan.... 23

2.2.8 Pengaruh Sektor Jasa dengan Ketimpangan Pendapatan 24
2.2.9 Pengaruh Sektor Keuangan dengan Ketimpangan Pendapatan 25
2.2.10 Pengaruh Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan 26
2.2.11 Pengaruh Tingkat Pendidikan dengan Ketimpangan Pendapatan... 27
2.3 Kerangka Pemikiran 27
2.4 Hipotesis Penelitian 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1 Populasi dan Sampel 31
3.2 Jenis dan Sumber Data 33
3.3 Metode Pengumpulan Data 34
3.4 Variabel Penelitian 34
3.4.1 Variabel Dependen 34
3.4.2 Variabel Independen 34
3.5 Definisi Operasional Variabel 35
3.6 Metode Analisis yang Digunakan 40
3.7 Uji T (Pengunjian variabel secara individu) 45
3.8 Uji F (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh) 46
3.9 Koefisien Determinasi (R^2) 46
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 48
4.1 Deskripsi Data Penelitian 48
4.2 Hasil Analisis 50
4.2.1 Chow Test (Uji F-statistik) 50
4.2.2 Hausman Test 51
4.3 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect* 52
4.4 Uji Hipotesis 54

4.4.1 Uji t statistik 54
4.4.2 Uji F Statistik 58
4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2) 58
4.5 Interpretasi Hasil Analisis 59
4.5.1 Nilai Intersep 59
4.5.2 Analisi PAD terhadap Ketimpangan Pendapatan 60
6.4.1 Analisis DAU terhadap Ketimpangan Pendapatan 61
7.4.1 Analisi Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan 62
7.4.2 Analisis Pengaruh Sumbangan Sektor Pertanian terhadap Ketimpangan Pendapatan 62
7.4.3 Analisis Pengaruh Sumbangan Sektor Manufaktur terhadap Ketimpangan Pendapatan 63
7.4.4 Analisis Pengaruh Sektor Jasa terhadap Ketimpangan Pendapatan 64
7.4.5 Analisis Pengaruh Sumbangan Sektor Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan 64
7.4.6 Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan 65
7.4.7 Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Ketimpangan Pendapatan 66
7.4.8 Analisis Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan .. 66
BAB V PENUTUP 68
5.1 Kesimpulan 68
5.2 Implikasi 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rangkuman Kajian Pustaka 13
Tabel 3. 1 Ringkasan Data 38
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif 49
Tabel 4. 2 Lanjutan Hasil Statistik Deskriptif 49
Tabel 4. 3 Uji Chow 51
Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman 52
Tabel 4. 5 Estimasi Hasil Regresi Fixed Effect 52
Tabel 4. 6 Ringkasan Hasil Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect .. 54
Tabel 4. 7 Hasil uji F dari Estimasi Fixed Effect 58
Tabel 4. 8 Nilai Intersep 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Per Sektor . 2
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 29
Gambar 3. 1 Pengujian Pemilihan Model dalam Pengolahan Data Panel 45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Perkembangan Indeks Gini 32 Provinsi di Indonesia..... 4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian..... 76
Lampiran 2 Hasil Regresi Common Effect..... 88
Lampiran 3 Estimasi Hasil Regresi Random Effect 89

Abstrak

Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum seperti yang tersurat pada alenia IV Pembukaan UUD 1945. Namun, kenyataan di lapangan pembangunan yang terjadi selama ini belum merata antar satu daerah dengan daerah yang lain, yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2007-2016.

Analisa dilakukan menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia spada periode 2007-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pada sektor pertanian, sektor maufaktur, sektor keuangan, dana alokasi umum, dan belanja modal dapat memperbaiki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Peningkatan sektor jasa, pendapatan asli daerah, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendidikan dapat memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan.

Kata kunci : **PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pendidikan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintahan daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memacu sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah besar dalam waktu singkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Pada masa orde baru, pemerintah mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan melakukan industralisasi. Industri yang utamanya padat modal dapat memberikan niai tambah yang lebih besar daripada sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan sektor industri, berdampak pada cepatnya pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempercepat proses perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi ditandani oleh semakin menurunya kontribusi sektor pertanian, semakin meningkatnya

kontribusi sektor industri, dan jasa yang kurang lebih konsisten, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (BPS, 2010).

Jika, dilihat proses perubahan struktur yang terjadi di Indonesia selama masa pembangunannya tahun 2007-2016, terlihat bawah perubahan struktur ekonomi di Indonesia ditandai dengan menurunya kontribusi sektor pertanian dan semakin meningkatnya kontribusi sektor jasa, industri dan keuangan.

Gambar 1. 1 Perbandingan Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Per Sektor

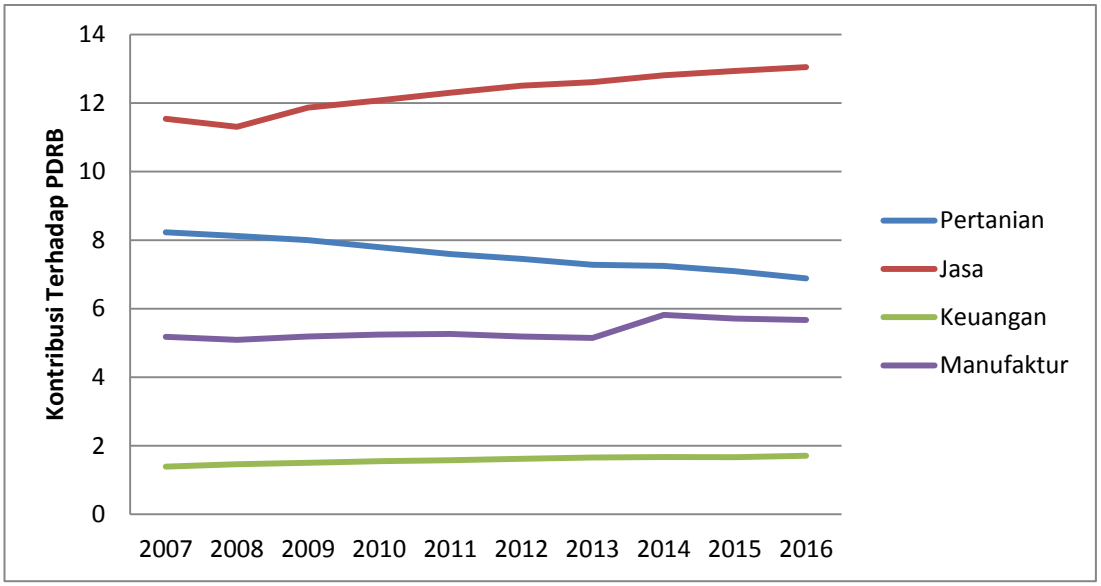

Penurunan kontribusi sektor pertanian tersebut diikuti dengan peningkatan kontribusi sektor jasa. Hal ini merupakan indikasi awal bahwa struktur perekonomian di Indonesia perlahan mulai bergeser ke sektor jasa. Sektor jasa dianggap sebagai tahap tertinggi dalam proses pembangunan ekonomi.

Seiring dengan gerak pembangunan yang dilakukan, ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kemiskinan menjadi lingkaran masalah yang sulit diatasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan rumahtangga dan individu yang mendasar lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun angka kemiskinan masih tetap tinggi. Sulitnya mengurangi angka kemiskinan disebabkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menggambarkan bahwa hanya sebagian besar masyarakat yang terdiri dari karyawan dan buruh hanya menikmati sedikit dari pendapatan nasional (Djojohadikusumo, 1954).

Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut merupakan suatu masalah yang penting dan harus segera diatasi karena ketimpangan pendapatan berdampak bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial. Todaro (2003) menyebutkan dua alasan mengapa ketimpangan harus diperhatikan yaitu, ketimpangan yang ekstrem dapat meyebabkan inefisiensi ekonomi serta melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.

Indonesia memiliki 34 provinsi dan ada provinsi yang paling menonjol pada tingat Indeks Gini. Kondisi ketimpangan pendapatan antar provinsi dapat digambarkan melalui grafik 1.1

Grafik 1. 1 Perkembangan Indeks Gini 32 Provinsi di Indonesia

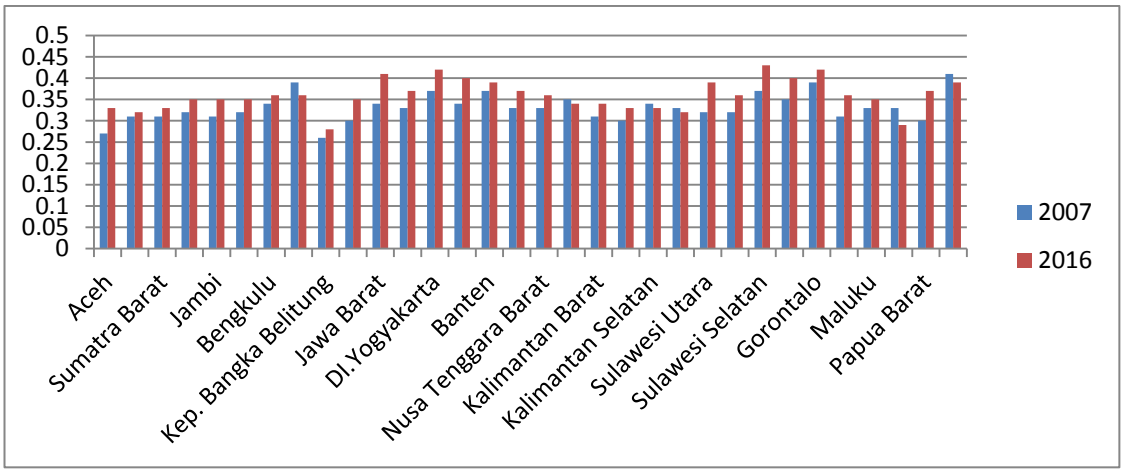

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan tersebut yaitu menggunakan ratio gini yang memiliki nilai 0 sampai dengan 1. Rasio gini kecil lebih kecil dari 0,4 menunjukkan ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Untuk melihat nilai rasio gini di Indonesia berdasarkan provinsi pada kurun waktu 2007-2016, dapat di lihat pada grafik 1.1

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, pada kurun waktu 10 tahun dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 provinsi Gorontalo merupakan daerah yang memiliki ketimpangan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu sebesar 0,46 sementara Kepulauan Bangka Belitung memiliki ketimpangan lebih

rendah yakni sebesar 0,26 pada tahun 2007 dan 2008. Masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi pada setiap Provinsi pada setiap tahunnya mengalami naik turun di setiap Provinsi menjadi masalah serius yang harus diatasi baik itu oleh pemerintah atau pihak yang terkait. Ketimpangan antar daerah akan terus terjadi bahkan meningkat apabila tidak adanya implikasi atau kebijakan dari pemerintah dalam menurunkan ketimpangan tersebut, baik dari sisi fisikal maupun distribusi pendapatan. Menurut Nazara (2010) disparitas antar daerah adalah masalah struktural di perekonomian Indonesia. Dimana selama empat dekade pembangunan ekonomi tidak terjadi perubahan yang berarti dalam distribusi pendapatan antar daerah. Hal ini terjadi bersamaan dengan peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dalam kerangka proses akumulasi, alokasi dan transisi demografi.

Mengingat cukup besar dampak yang ditimbulkan akibat ketimpangan distribusi pendapatan, maka diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang semakin parah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan diantaranya

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengambil judul dalam penelitian tentang, "**Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi, Investasi Asing, DAU Dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan"**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh DAU, PAD dan Belanja Modal terhadap ketimpangan pendapatan?
2. Bagaimana pengaruh Sumbangan PDRB sekor Jasa, Keuangan, Manufaktur dan Keuangan terhadap Ketimpangan pendapatan?
3. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan?
4. agaimana pengaruh PMA dan PMDN terhadap Ketimpangan Pendapatan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan, maka tujuan yang ingin di capai untuk menyelesaikan permasalaha tersebut adalah:

1. Menganalisis pengaruh DAU, PAD dan Belanja Modal terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Menganalisis pengaruh Sumbangan PDRB sektor Jasa, Keuangan, Manufaktur dan Keuangan terhadap ketimpangan pendapatan.
3. Menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan.
4. Menganalisis pengaruh PMA dan PMDN terhadap ketimpangan pendapatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri, dengan harapan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang ketimpangan pendapatan
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan variabel serta analisis dalam penelitian ini, maka perlu kiranya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Ketimpangan Distribusi Pendapatan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di tingkat daerah.

Menurut Penelitian yang dilakukan Nurul Rahmawati (2013) "Perubahan Struktur Ekonomi dan Katimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat 2008-2011" dengan variabel dependennya Ketimpangan Pendapatan (Y) dan variabel independennya PDRB Sektor Pertanian (X1), Sektor Industri (X2), Sektor Jasa (X3), Tingkat Pendidikan Pekerja (X4), dan Pertumbuhan Penduduk (X5). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai perubahan ekonomi sektoral, perubahan struktur ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2011. Hasil analisis menunjukkan, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian adalah yang paling rendah dari pada sektor industri jasa. Kemudian, strukttur ekonomi Jawa Barat mulai menunjukkan pergeseran ke sektor jasa. Hal ini juga diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang yang semakin memburuk di Jawa Barat, terlihat dari rasio gininya yang semakin meningkat, kondisi ini juga terjadi sampai level kabupaten/kota. Hasil analisis dari panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian berpengaruh terhadap penurununan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan

pertumbuhan ekonomi sektor jasa meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Barat.

Ni Putu Valentiana dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan" penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t dan F serta uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Bali. Variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan, sedangkan dana alokasi umum meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di Bali.

Masri Fithrian, dkk dalam jurnal penelitiannya yang berjudul " Analisis Pengaruh *Aggregat Demand* dan Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh" penulis menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan efek tetap (fixed effect model). Variabel dependen yang digunakan ketimpangan pendapatan (Y), variabel sektor konsumsi (X1), Investasi (X2) dan Tingkat Pendidikan (X3). Hasil estimasi model fixed effect diperoleh koefisien determinasi 0.857452 yang berarti 85,74 persen ketimpangan pendapatan Aceh mampu dijelaskan oleh variabel (konsumsi, investasi, tingkat pendidikan). Variabel Investasi dan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Siti Aisyah dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan Indonesia: Studi

Kasus 26 Provinsi di Indonesia". Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan dan hubungan ini adalah positif. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan.

Linda (2007) dalam penelitiannya yang berjudul " Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Peranannya dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur". Penelitian ini menggunakan metode yaitu *Location Quotient* untuk mengetahui sekor basis ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan Indeks Williamson untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan daerah. Hasil penelitian ini hanya memaparkan peranan sektor basis dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur. Terdapat lima sektor basis perekonomian yaitu sektor pertanian, sektor industri dan pengolahan, sektor listrik,gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Dari kelima sektor sektor pertanian memiliki peran besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Industri pengolahan, dan sektor perdagangan memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan dan menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur.

Syarifah Annisa dan Fiantiara Alkadri dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015" penelitian

menggunakan metode data panel. Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa PDRB sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan, sektor industri berpengaruh positif dan signifikan, sektor perdagangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Ahmad Pauzi dan Dewa Nyoman dalam penelitiannya yang berjudul " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan". Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil regresi yang didapatkan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Adi Sutrisno dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010" penelitian ini menggunakan metode analisis indeks williamson, indeks entropi theil, location quotient, shift share, tipologi klassen, skalogram, dan analisis overlay. Data yang digunakan dalam peneltian meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kapubaten/Kota. Hasil penelitian diperoleh bahwa pada periode 2007-2010 terjadi kecenderungan adanya peningkatan ketimpangan di kawasan barlingmascakeb.

Andi, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul "Indentifikasi Sektor Ekonomi Unggulan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Sub Das Bengawan Solo Hulu". Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan. Metode yang digunakan adalah tipologi klassen,

location quotient, dan indeks williamson. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa disparitas pendapatan antar kabupaten di Sub DAS Bengawan Solo Hulu relatif rendah (rataan indeks williamson periode 2000-2011 sebesar 0,25).

I Gusti Ayu dan Made Sukarsa dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali". Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa Pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.Hal ini berarti bahwa semakin besar investasi maka kesenjangan pendapatan akan semakin timpang.

Sri Danawati, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali" Hasil analisis diperoleh bahwa variabel bebas investasi secara langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Ini berarti bahwa variabel investasi meningkat maka ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat.

Adhitya Wardhana, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia". Dalam penelitian ini untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui instrumen

fisikal DAU dan DAK. Periode penelitian 2001-2010 menggunakan regresi data panel. Dari hasil regresi didapatkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Tabel 2. 1 Rangkuman Kajian Pustaka

No	Penulis	Judul	Alat Analisis	Kesimpulan
1.	Nurul Rahmawati (2013)	Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat 2008-2011	Regresi Data Panel	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, sektor industri berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan sektor jasa dan tingkat pendidikan pekerja meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Barat.
2.	Valentina,dkk (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan”	Regresi Linier Berganda	Variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh postif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di

				Provinsi Bali.
3.	Marsi Fitrian, dkk (2015)	Anasilis Pengaruh *Aggregat Demand* dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh	Regresi Data Panel	Variabel Investasi dan Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhdap ketimpangan distribusi pendapatan.
4.	Aisyah (2003)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia (Studi Kasus 26 Provinsi di Indonesia)	Metode Data Panel	Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan dan hubungannya adalah positif. Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan.
5.	Linda (2007)	Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Peranannya dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Analisis Location Quotient dan Indeks Williamson	Dari hasil analisis LQ sektor-sektor basis perekonomian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan hasilnya adalah bahwa sektor pertanian memiliki peran besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Sektor industri pengolahan, dan

				sektor perdagangan memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan dan menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur
6.	Syarifah Annisa dan Fiantiara Alkadri	Pengaruh Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2010-2015	Regresi data panel	-PDRB sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan -PDRB sektor perdagangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan
7.	Ahmad Pauzi dan Dewa Nyoman	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Secara Langsung Mauoun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Regresi data panel	Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa PMA tidaak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
8	Adi Sutrisno	Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb	Analisis williamson, indkes entropi theil, location quotient, shift share, tipologi klassen,	Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis location quotient, shift share dan tipologi klassen -Kab Banjarnegara

		Tahun 2007-2010	skalogram, dan analisis overlay.	memiliki sektor unggulan sektor jasa -Kab Purbalingga sektor bangunan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor keuangan dan sektor jasa -Kab Banyumas sektor keuangan serta sektor jasa -Kab Cilacap sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran -Kab Kebumen sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian.
9.	Andi, dkk.	Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Sub Das Bengawan Solo Hulu	Tipologi Klassen, location quotient, indeks williamson	Sektor unggulan Wonogiri adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, Karanganyar sektor industri pengolahan, Boyolali sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, Sragen adalah pertanian, Klaten adalah sektor konstruksi. Hasil perhitungan

				indeks williamson ketimpangan pendapatan di Kabupaten sub das Bengawan Solo periode 2000-2011 sebesar 0,25.
10.	I Gusti Ayu dan Made Sukarsa	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Regresi Linier Berganda	Dari hasil regresi didapatkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali
11.	Sri Danawati, dkk.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Serta Ketimpangan Pendapatn Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Metode Analisi Jalur dengan AMOS	Hasilnya variabel bebas investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
12.	Adhitya Wardhana, dkk	Dampak Transfer Pemerintahan Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia	Regresi Data Panel	Hasilnya variabel Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Robert E Baldwin (1986), kesenjangan pendapatan diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan miskin. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan. Umumnya para ekonom membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi pendapatan, yakni besar kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kememilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2003).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Akibatnya dari perbedaan itu maka akan terlihat kesenjangan yaitu yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin miskin terpuruk

2.2.2 Penyebab Terjadinya Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Aldeman dan Morris (1973) dalam arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan perkapita

2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga presentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan dari kerja, sehingga pengangguran bertambah
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijakan industri subtitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor dari negara-negara sedang berkembang
8. Memburuknya industry kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

2.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Ketimpangan Pendapatan

Selama ini Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46).

Oleh karena itu, pendapatan asli daerah menjadi salah satu unsur terpenting dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya. Daerah akan menjadi sangat maju tergantung pada sumberdaya maupun pengelolaan keuangan yang dimiliki pada daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin membesar antara daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masing-masing daerah. Akan tetapi, kenyataanya tingkat ketimpangan di masing-masing daerah masih terlihat jelas. Untuk mengurangi masalah ketimpangan tersebut diperlukan dana perimbangan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

2.2.4 Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Harianti & Hadi (2007), Proposi DAU dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan adanya dana alokasi umum yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fisikal dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat (Fattah & Irman, 2012). Pemberian Dana Alokasi Umum oleh pemerintah ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah.

Dalam Undang-Undang No.25 tahun 1999 tujuan alokasi DAU adalah menciptakan kemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga daerah kurang mampu akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif besar. Seperti diketahui bahwa ketimpangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin semakin membesar. DAU dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan asumsi bahwa DAU untuk belanja pembangunan daripada belanja rutin. Alokasi DAU untuk belanja pembangunan memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

2.2.5 Pengaruh Belanja Modal dengan Ketimpangan Pendapatan

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah dengan menambah aset tetap atau kekayaan pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu periode. Belanja modal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sekor pendidikan, kesehatan dan transportasi. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. Selain itu, tersediannya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akan mengurangi ketimpangan yang ada.

2.2.6 Pengaruh Sektor Pertanian dengan Ketimpangan Pendapatan

Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggantukan hidupnya pada sektor pertanian. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sektor pertanian. Indonesia memiliki provinsi-provinsi yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Sektor pertanian mampu menjangkau kebutuhan utama manusia yaitu pemenuhan kebutuhan pangan, selain itu dengan peningkatan produksi di sektor pertanian akan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Menurut BPS (2014), Salah satu sektor penting dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan adalah sektor pertanian. Hal ini didasarkan atas keadaan alam Indonesia yang agraris dan sektor pertanian masih sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling besar yaitu 34,36%. Revitalitas sektor pertanian dalam arti luas, mulai dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan sampai basis sumber daya alam lainnya diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan penyediakan lapangan pekerjaaan. Dengan revalitas pertanian, pemerintah mentargetkan akan terjadi penurunan jumlah pengangguran, meningkatkan distribusi pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan.

2.2.7 Pengaruh Sektor Manufaktur dengan Ketimpangan Pendapatan

Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri merupakan suatu fungsi dan tujuan pokok kesejahteraan rakyat. Industrialisasi atau maufaktur juga tidak lepas untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia.

Bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, pembangunan sektor manufaktur merupakan satu-satunya pilihan, sebab sektor inilah yang mampu memberikan lapangan kerja besar dengan pengupahan yang lebih sistemastis dibandingkan setor industri produk primer (pertanian) maupun industri jasa. Dengan berkembangnya industri pengolahan di Indonesia tentunya memiliki dampak positif terhadap sektor-sektor lain. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur selalu memiliki nilai tukar yang tinggi dan menguntungkan, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Sektor ini tidak saja berpotensi untuk memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah penciptaan lapangan kerja dan devisa. Menurut (BPS) untuk menekan gini ratio, pemerintah

perlu meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satu caranya dengan mendorong industri pengolahan (manufaktur) baik untuk skala industri kecil dan menengah maupun besar. Maka dari itu industri pengolahan/manufaktur dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

2.2.8 Pengaruh Sektor Jasa dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Mursid (1993:116), jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Dalam penelitian ini, sektor jasa meliputi perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa perusahaan dan jasa-jasa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor ekonomi ke-3 terbesar dalam hal memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, bahwa di setiap daerah yang di Indonesia memiliki hotel dan restoran. Dan tidak dapat diragukan lagi dengan adanya hotel dan restoran dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan Nurul (2014) Tingginya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi ini utamanya

disumbang oleh tingginya pertumbuhan ekonomi sub sektor komunikasi. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya produk alat-alat komunikasi. Namun sayangnya hal tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepuasan pribadi dan belum menyentuh usaha produktif, sehingga tidak berdampak kepada pemerataan pendapatan.

2.2.9 Pengaruh Sektor Keuangan dengan Ketimpangan Pendapatan

Sektor keuangan sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Bank Dunia, sektor keuangan yang semakin berkembang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan merendam volatilitas ekonomi makro. Namun rekomendasi tersebut masih menimbulkan perdebatan baik secara teori maupun secara empiris. Ada dua hal pokok yang masih diperdebatkan terkait perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi dan volatilitas ekonomi makro.

Akses terhadap sektor keuangan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat, baik melalui kesempatan yang lebih baik untuk memulai atau memperbesar usaha, menyelesaikan pendidikan ataupun kualitas hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa sektor keuangan dapat mendorong alokasi sumber daya yang lebih merata, meningkatkan produktifitas masyarakat, dan menurunkan kesenjangan.

2.2.10 Pengaruh Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Investasi, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA, tentunya diperlukan dalam mencapai suatu target pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam sebuah proses pembangunan. Kesejahteraan dan membaiknya kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat tercapai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/ investasi merupakan fator penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam prespektif janga waktu yang lebih panjang.

Sesuai dengan teori, investasi akan memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sebagai konsekwensi naiknya pendapatan yang diterima masyarakat (Sun'an & Astuti, 2008). Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka pendapatan cenderung membaik, sehingga dapat menguarangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Dapat kita simpulkan, investasi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.11 Pengaruh Tingkat Pendidikan dengan Ketimpangan Pendapatan

Para pakar ekonomi klasik seperti *Malthus, Richardo,* dan *Mill* mengemukakan pandangan yang sangat optimistik bahwa antara pembangunan infrastruktur pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan pendidikan yang baik meniscayakan pertumbuhan ekonomi yang memadai dari suatu negara.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan (Cahyono, 1998). Dengan meningkatnya tingkat pendidikan pekerja, diharapkan dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Karena dengan pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi pula. Namun berbagai penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa, berlawanan dengan pendapat umum, sistem pendidikan di negara berkembang kadang-kadang bukan mengurangi, namun justru memperburuk ketimpangan pendapatan (Todaro, 2003).

2.3 Kerangka Pemikiran

Masalah distribusi pendapatan merupakan bagian yang terpenting dalam mengukur pembangunan ekonomi, alasannya karena dengan naiknya distribusi pendapatan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh sukirno (2000) bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Nmaun permasalahan

yang dihadapi saat ini, menunjukkan bahwa dalam distribusi pendapatan yang terjadi, bahwa hanya 20% penduduk yang memiliki distribusi pendapatan yang tinggi, sedangkan 80% bagi penduduk menengah ke bawah (Ahlwuwalia, 1997).

Berdasarkan atas penyebab ketimpangan distibusi pendapatan dan tingkat ketimpangan antar provinsi dari tahun ke tahun cenderung meningkat maka dapat diambil suatu kerangka penelitian yakni Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Investasi Asing, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Selain memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan bagaimana distribusi hasil-hasilnya kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi disusun atas pertumbuhan ekonomi sektoralnya. Pertumbuhan ekonomi sektoral akan sangat menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi akan menentukan pola dari perubahan stukutur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yag tinggi hendaknya menjadi salah satu faktor penentu pemerataan distribusi pendapatan. Namun hal ini bergantung bagaimana karakter ekonomi itu sendiri. Salah satunya adalah sektor-sektor ekonomi apa yang menjadi prioritas, maka pertumbuhan akan lebih cepat dari sektor ekonomi yang lain. Tentunya sektor yang mendapat prioritas haruslah sektor yang dapat memberikan manfaat (peningkatan pendapatan) bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemeikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas dengan variabel dependen (terikat) dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah :

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distrubusi pendapatan.
2. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Diduga Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
4. Diduga sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
5. Diduga sektor manufaktur berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
6. Diduga sektor jasa berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
7. Diduga sektor keuangan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
8. Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
9. Diduga Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
10. Diduga Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi ketimpangan pendapatan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan kumpulan dari seluruh sumber elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam sebuah penelitian. Sampel diartikan sebagai bagian dari popilasi datau bagian representative dari sebuah populasi. Poupulasi ini menggunakan 32 provinsi yang ada di Indonesia.

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan oleh penulis sendiri dan didasarkan beberapa pertimbangan dengan kriteria tertentu yang digunakan untuk penelitian.

Teknik *purposive sampling* ini digunakan penulis dikarenakan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dan bersifat sama antar sampel satu dengan sampel lainnya. Disamping itu juga karena keterbatasan akses data dari peneliti karena tidak semua provinsi memiliki data dengan jumlah tahun yang sama. Provinis yang digunakan pada penelitian ini adalah provinsi yang dibawah tahun 2007 yang telah mempunyai kelengkapan data dan publikasi. Data rasio gini, PDRB, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Angka Partisipasi Sekolah, PMA dan PMDN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sampel yang didapat dan memenuhi kriteria yaitu provinsi yang berdiri dibawah tahun 2007, provinsi tersebut antara lain :

1. Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatra Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. Bangka Belitung
10. Kepulauan Riau
11. Jawa Barat
12. Jawa Tengah
13. DIY
14. Jawa Timur
15. Banten
16. Bali
17. Nusa Tenggara Barat
18. Nusa Tenggara Timur
19. Kalimantan Barat
20. Kalimantan Tengah
21. Kalimantan Selatan
22. Kalimantan Timur
23. Sulawesi Utara
24. Sulawesi Tengah
25. Sulawesi Selatan
26. Sulawesi Tenggara
27. Gorontalo
28. Sulawesi Barat
29. Maluku
30. Maluku Utara
31. Papua Barat
32. Papua

Sedangkan selebihnya provinsi di Indonesia yang tidak digunakan dalam penelitian karena belum mempunyai data yang lengkap, disamping itu beberapa provinsi di Indonesia termasuk provinsi baru pada tahun yang dijadikan penelitian. Dari jumlah yang digunakan untuk observasi sebanyak

32 provinsi dan merupakan data tahunan dari tahun 2007 hingga tahun 2016, maka jumlah observasi yang di dapat sebanyak 320.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari beberapa sumber antara lain Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber laiinya. Data yang digunakan adalah :

1. Data indeks gini 32 Provinsi di Indonesia periode tahun 2007-2016.
2. Data PDRB menurut lapangan usaha 32 Provinsi di Indonesia periode tahun 2007-2016.
3. Data Pendapatan Asli Daerah 32 Provinsi di Indonesia periode tahun 2007-2016.
4. Data Dana Alokasi Umum 32 Provinsi di Indonesia periode tahun 2007-2016.
5. Data Belanja Modal 32 Provinsi di Indonesia periode tahun 2007-2016.
6. Data Tingkat Pendidikan 32 Provinsi di Indonesia periode tahun 2007-2016.
7. Data Investasi Asing 32 Provinsi di Indonesia periode tahun 2007-2016.
8. Data Investasi Dalam Negeri 32 Provinsi di Indonesia periode tahub 2007-2016.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi secara langsung dan tidak langsung. Peneliti secara langsung mendatangi Badan Pusat Statistik Provinsi DIY untuk menyalin hard file data yang diperlukan dan secara tidak langusng melalui website Badan Pusat Statistik peneliti mengunduh data yang diperlukan. Adapun situs yang digunakan adalah http://bps.go.id/ . Metode lain yang digunakan adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan informasi yang relevan melalui jurnal, artikel maupun penelitian terdahulu dari berbagai sumber guna untuk mendukung penelitian dalam memahami dan mempelajari pembahasan.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen disebut juga variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Rasio Gini.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain atau disebut variabel bebas. Variabel-variabel independen yang akan di uji dalam penelitian ini adalah

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Alokasi Umum

3. Belanja Modal
4. Sumbangan Sektor Pertanian
5. Sumbangan Sektor Manufaktur
6. Sumbangan Sektor Jasa
7. Sumbangan Sektor Keuangan
8. Penanaman Modal Dalam Negeri
9. Penanaman Modal Asing
10. Tingkat Pendidikan

3.5 Definisi Operasional Variabel

Beberapa definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rasio Gini

   Rasio gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan atau kekayaan didistribusikan diantara populasi dalam bentuk rasio yang nilainyas

   antara 0 dan1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna yaitu satu orang menguasi semuanya sedangkan yang lainnya tidak memiliki apa-apa.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan berasal dari APBN. Tujuan diberikannya dana ini adalah untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah, kebutuhan akan belanja pegawai, kebutuhan fisikal, dan juga potensi daerah (UU No. 33 Tahun 2004)

4. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

5. Sumbangan Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang seperti indonesia yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani.

6. Sumbangan Sektor Manufaktur

   Industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi.

7. Sumbangan Sektor Jasa

   Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Dalam penelitian ini, sektor jasa meliputi perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa perusahaan dan jasa-jasa.

8. Sumbangan Sektor Keuangan

   Sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

9. Penanaman Modal Dalam Negeri

   Penanaman modal dalam negerti (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI oleh investor atau penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

10. Penanaman Modal Asing

    Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam

negeri. Modal asing dapat dimasukkan dalam bentuk modal swasta atau modal negara.

11. Tingkat Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tabel 3. 1 Ringkasan Data

No	Variabel	Satuan	Periode	Sumber Data
1.	Pendapatan Asli Daerah	Dalam Miliar Rupiah	Mulai dari tahun 2007-2016	Statistik Keuangan Indonesia
2.	Dana Alokasi Umum	Dalam Miliar Rupiah	Mulai dari tahun 2007-2016	Statistik Keuangan Indonesia
3.	Belanja Modal	Dalam Miliar Rupiah	Mulai dari tahun 2007-2016	Statistik Keuangan Indonesia
4.	Sumbangan Sektor Pertanian	Dalam Miliar Rupiah	Mulai dari tahun 2007-2016	PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapanagn Usaha

5.	Sumbangan Sektor Manufaktur	Dalam Miliar Rupiah	Mulai dari tahun 2007-2016	PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha
6.	Sumbangan Sektor Jasa	Dalam Miliar Rupiah	Mulai dari tahun 2007-2016	PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha
7.	Sumbangan Sektor Keuangan	Dalam Miliar Rupiah	Mulai dari tahun 2007-2016	PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha
8.	Penanaman Modal Dalam Negeri	Dalam Juta Rupiah	Mulai dari tahun 2007-2016	Perekonomian Indonesia
9.	Penanaman Modal Asing	Dalam Miliar Rupiah	Mulai dari tahun 2007-2016	Perekonomian Indonesia
10	Tingkat Pendidikan	Dalam Persen	Mulai dari tahun 2007-2016	Badan Pusat Statistik

3.6 Metode Analisis yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan *E-views 8.* Data panel merupakan gabungan antara data silang *(cross-section)* dengan data runtut waktu *(time series)*. Penggunaan data panel dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu informasi antar unit *(cross section)* pada perbedaan antar subjek, dan informasi antar waktu *(time series)* yang mereflesikan perubahan pada subjek waktu. Dalam metode data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut

$Yi = \beta 0 + \beta 1\ Xi + \mu i\ ;\ t = 1,2,...,N$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*

Sedangkan persamaan model dengan *time series* adalah :

$Yt = \beta 0 + \beta 1\ Xt + \mu t\ ;\ t = 1,2,...,N$

Dimana T adalah banyaknya data *time series.*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section,* maka model dapat ditulis dengan :

$Yit = \beta 0 + \beta 1\ Xit + \mu it$

$i= 1,2,...,n\ ;\ t=1,2,...,T$

dimana :

N = Banyaknya observasi

T = Banyaknya waktu

N × T = Banyaknya data panel

Hsiao (1986), menyatakan bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* maupun *time series.*

1. Dapat memberikan penelitian jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan derajat kebersamaan, data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
2. Panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja.
3. Panel data dapat memberikan penyelesain yang baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section.*

Model Regresinya dalam bentuk linier adalah sebagai berikut:

$$GINI_{it} = \beta0 + \beta1(PAD)_{it} + \beta2(DAU)_{it} + \beta3(BM)_{it} + \beta4(PP)_{it} + \beta5(PM)_{it} + \beta6(PJ)_{it} + \beta7(PK)_{it} + \beta8(PMDN)_{it} + \beta9(PMA)_{it} + \beta10(TP)_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

GINIit = Variabel Dependen

β0 = Konstanta

β1, β2, β3,... = Koefisien variabel Independen

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum

BM_{it} = Belanja Modal

PP_{it} = Sumbangan Sektor Pertanian

PM_{it} = Sumbangan Sektor Manufaktur

PJ_{it} = Sumbangan Sektor Jasa

PK_{it} = Sumbangan Sektor Keuangan

$PMDN_{it}$ = Penanaman Modal Dalam Negeri

PMA_{it} = Penanaman Modal Asing

TP_{it} = Tingkat Pendidikan

E_{it} = Error

Dalam analisis metode panel data dikenal, tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan *common effect*, pendekatan *fixed effect* dan pendekatan *ramdom effect*. Ketiga pendekatan yang dilakukan dalam analisis panel data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu *(Common Effect)*

Teknik yang paling sederhana yaitu dengan menggabungkan data time series dan data cross section disebut metode common effect atau metode OLS (Ordinary Least Square). Metode ini tidak memperhatikan

perbedaan baik antar waktu maupun antar individu sehingga hasil analisis regresi diasumsikan sama pada individu atau objek dalam berbagai periode waktu.

b. Pendekatan Slope Konstan tetapi Intersep Berbeda Antar Individu *(Fixed effect)*

Pada pembahasan sebelumnya kita mengasumsikan bahwa intersep maupun slope adalah sama baik antar waktu maupun antar perusahaan. Namun, asumsi ini jelas sangat jauh dari kenyataan sebenarnya. Adanya vairiabel-variabel yang tidak semuanya masuk dala persamaan model memungkinkan adanya intersep yang tidak konstan atau denga kata lain, intersep ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar oemikiran pembentukan model tersebut.

Model *fixed effect* merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya intersep (Widarjono, 2009:232). Metode ini disebut juga metode LSDV *(Least Square Dummy Variabel).*

c. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect)*

Pada model efek tetap, perbedaan antar-individu dan tahun waktu dicerminkan lewat intersep, maka pada model efek acak, perbedaan tersebut diakomondasikan lewat *error*. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkolerasi sepanjang *time series* dan *cross secction*.

Dalam mengestimasi regresi data panel terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu Metode Model *Common Effect,* model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect.*

Pemilihan model yang akan digunakan dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Dan beberapa metode yang paling baik untuk digunakan adalah:

1. *Chow Test* (uji F-statistik) adalah pengujian untuk memilih model *Common Effect* (tanpa variabel dummy) atau dengan model *Fixed Effect*.
2. *Uji Langrange Multipler* (LM) atau lengkapnya *TheBreusch-Pagan LM Test.* Digunakan untuk memilih model *Common Effect* (tanpa variabel dummy) atau dengan model *Random Effect*.
3. Dan yang terakhir dengan menggunakan uji Hausman untuk membandingkan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang lebih baik digunakan.

Gambar 3. 1 Pengujian Pemilihan Model dalam Pengolahan Data Panel

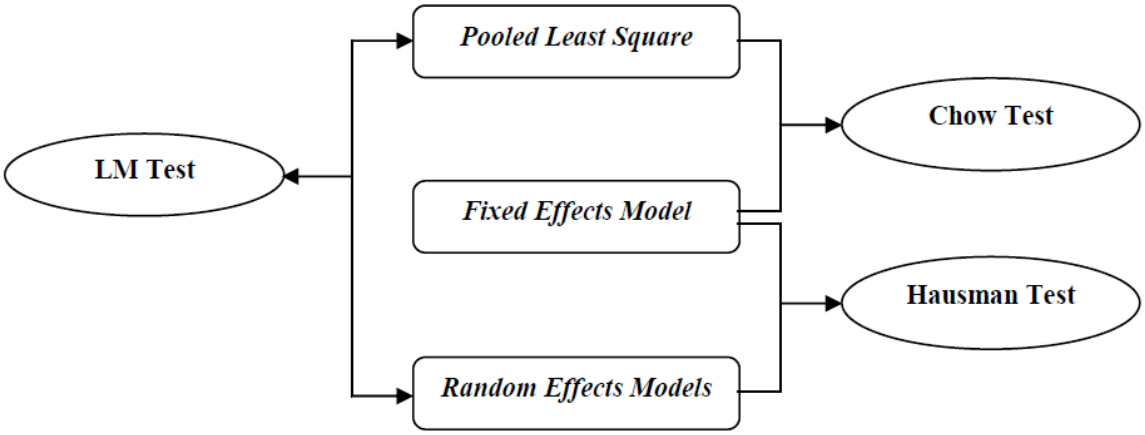

Sumber: Baltagi (1995)

3.7 Uji T (Pengunjian variabel secara individu)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Hipotesis uji t sebagai berikut:

1. Jika hipotesis signifikasi positif
   a. Ho : βi = 0, artinya variabel independen secara individu tidak berpengrauh secara signifikan terhadap variabel dependen
   b. H1 : βi > 0, artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen
2. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 1,5,10%.s

   Kriteria pengujian :

   a. Jika nilai prob T-statistik > 0,01 0,05 0,10 maka Ho diterima, artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terkait secara signifikan.

b. Jika nilai prob T-statistik < 0,01 0,05 0,10 maka Ho ditolak, artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

3.8 Uji F (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikasi atau tidak signifikasnnya antara variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama-sama). Uji F ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Ho : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = \beta_9 = \beta_{10} = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

   Ho : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq \beta_7 \neq \beta_8 \neq \beta_9 \neq \beta_{10} = 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Menentukan besarnya nilai F hitung dan signifikansi F (sig-F)
3. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 1,5,10%
4. Kriteria pengujian:
   a. Jika nilai F > 0,01 0,05 0,10 maka Ho diterima, artinya variabel bebas secara serentak tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
   b. Jika nilai F < 0,01 0,05 0,10 maka Ho ditolak, artinya variabel bebas secara serentak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

3.9 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model semua variabel independen dalam menerangkan variasi variabel

dependen dalam menerangkan variasi variabel dependen atau untuk mengukur seberapa besar proposi variabel dependen atau untuk mengukur seberapa besar proposi variabel dependen dapat dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Dewi (2010) mengungkapkan bahwa besarnya nilai R^2 jika semakin mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Besarnya R^2 jika mendekati 1 berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variasi variabel terikat. Selain itu koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variasi variabel terikat yang disebabkan oleh variasi variabel bebas.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu *websitte* resmi badan pusat statistika dan badan pusat statistika provinsi DIY. Jenis data yang digunakan adalah data panel dari tahun 2007-2016 yang terdiri dari rasio gini, PDRB menurut lapangan usaha yakni pertanian, perternakan dan kehutanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan real estat dan jasa perusahaan, jasa-jasa, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan angka partisipasi sekolah (umur 18-24). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh perubahan struktur ekonomi, investasi asing, pad, dau, belanja modal dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di 32 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan alat bantu program *software E-views 8.*

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

	PAD?	DAU?	BM?	PP?	PM?
Mean	0.357375	303232.9	118035.6	0.236589	0.167212
Median	0.360000	190398.8	82775.45	0.236122	0.122600
Maximum	0.460000	10239332	929197.3	0.516256	0.739170
Minimum	0.260000	13357.62	7586.670	0.039080	0.013556
Std.Dev	0.041067	751234.8	111619.4	0.097697	0.138383
Jarque-Bera	5.026483	256741.6	1675.219	1.844384	174.3302
Probability	0.081005	0.000000	0.000000	0.397646	0.000000
Observations	320	320	320	320	320

Tabel 4. 2 Lanjutan Hasil Statistik Deskriptif

	PJ?	PK?	PMA?	PMDN?	TP?
Mean	0.385661	0.049441	508.0720	2835.754	19.20519
Medium	0.378710	0.045450	119.6000	678.1500	17.15500
Maximum	0.607574	0.110609	7124.900	46311.60	49.95000
Minimum	0.153666	0.010158	0.000000	0.000000	7.070000
Std.Dev	0.097970	0.021168	955.0468	5826.551	8.082041
Jarque-Bera	1.834422	28.63890	4658.934	4.143020	132.1319
Probability	0.399632	0.000001	0.000000	0.000000	0.000000
Observations	320	320	320	320	320

Tabel diatas menunjukkan ringkasan statistik dari beberapa variabel-variabel (indeks gini, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, sektor pertanian, sektor manufaktur, sektor jasa, sektor keuangan, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan tingkat pendidikan). Dengan hipotesis H0: distribusi residual dapat dilihat melalui probability atas jarque-bera dan tingkat signifikasi (α = 5%) ditentukan bahwa variabel DAU, BM, PM, PMA, PMDN dan TP residualnya belum terdistribusi secara normal. Sedangkan variabel-variabel PAD, PP, PJ, dan PK telah terdistribusi secara normal.

Untuk mengetahui model pendekatan regresi data panel yang paling sesuai untuk penelitian, maka dilakukan pengujian model antara *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Estimasi panel data yang dilakukan dalam penelitian yaitu tahun 2007-2016. Setelah diperoleh model estimasi yang paling tepat, kemudian dilakukan regresi. Daeri hasil regresi dilakukan uji kelayakan model yang terdiri dari uji R^2, uji t, dan f.

4.2 Hasil Analisis

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil-hasil pengujian hasil akhir estimasi. Pengujian yang dilakukan antara lain penaksiran model penelitian, pembahasan uji statistik, uji hipotesis, dan analisis ekonomi.

4.2.1 Chow Test (Uji F-statistik)

Uji Chow dapat digunakan untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dibandingkan model PLS dapat dilakukan dengan melihat signifikasi model FEM dapat dilakukan dengan uji statistik F.

Tabel 4. 3 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PROVINSI
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.740178	(31,278)	0.0000
Cross-section Chi-square	235.300183	31	0.0000

Pada hasil uji chow GINI diatas dapat dilihat bahwa probabilitas F adalah sebesar 0.0000. Hal ini menunjukan bahwa signifikan pada tingkat (α) = 5% karena nilai F lebih kecil dari α = 5%. Maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga model data yang digunakan adalah *Fixed Effect* Model.

4.2.2 Hausman Test

Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah *fixed effect model*, model data panel dibandingkan antara fixed effect model dengan random effect. Uji hausman digunakan untuk mengetahui apakah model fixed effect lebih baik dari model random effect. Dari hasil regresi diperoleh pengujian Hausman untuk *Random Effect* dengan *Fixed Effect* diperoleh probabilitas Cross sectionrandom sebesar 0.0076 < α = 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dapat digunakan adalah *fixed effect model*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: PROVINSI
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.994841	10	0.0076

4.3 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Tabel 4. 5 Estimasi Hasil Regresi Fixed Effect

Dependent Variable: INDEKS_GINI?
Method: Pooled Least Squares
Date: 11/14/17 Time: 17:18
Sample: 1 10
Included observations: 10
Cross-sections included: 32
Total pool (balanced) observations: 320

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.375057	0.041955	8.939439	0.0000
PAD?	1.88E-08	1.70E-07	0.110173	0.9124
DAU?	-2.55E-10	2.27E-09	-0.111992	0.9109
BM?	-5.55E-08	2.71E-08	-2.044303	0.0419
PP?	-0.432240	0.101069	-4.276674	0.0000
PM?	-0.010409	0.028001	-0.371755	0.7104
PJ?	0.228482	0.120056	1.903130	0.0581
PK?	-0.194023	0.360425	-0.538316	0.5908
PMA?	5.69E-06	3.37E-06	1.685916	0.0929
PMDN?	4.83E-07	4.32E-07	1.117871	0.2646
TP?	0.000502	0.000564	0.890232	0.3741
Fixed Effects (Cross)				
ACEH—C	-0.061188			
BALI—C	-0.052196			
BANTEN—C	-0.041159			
BENGKULU—C	0.036973			
DIY—C	-0.015963			
GORONTALO--C	0.075667			
JAMBI—C	0.008922			
JAWABARAT--C	-0.042865			
JAWATENGAH--C	-0.028419			
JAWATIMUR--C	-0.080143			
KALBAR—C	-0.007073			
KALSEL—C	0.003030			
KALTENG—C	-0.007461			
KALTIM—C	-0.043741			

KEPBABEL—C	-0.050709		
KEPRIAU—C	-0.086357		
LAMPUNG—C	0.095942		
MALUKU—C	-0.010715		
MALUKUUTARA--C	0.003606		
NTB—C	0.011858		
NTT—C	0.024799		
PAPUA—C	0.055452		
PAPUABARAT--C	0.046506		
RIAU—C	-0.004667		
SULAWESIBARAT--C	0.092760		
SULSEL—C	0.064991		
SULTENGAH--C	0.074079		
SULTENGGARA--C	0.064032		
SULUT—C	-0.024292		
SUMBAR—C	-0.062398		
SUMSEL—C	-0.005050		
SUMUT—C	-0.034221		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.658371	Mean dependent var	0.357375
Adjusted R-squared	0.607987	S.D. dependent var	0.041067
S.E. of regression	0.025712	Akaike info criterion	-4.361881
Sum squared resid	0.183795	Schwarz criterion	-3.867289
Log likelihood	739.9009	Hannan-Quinn criter.	-4.164381
F-statistic	13.06705	Durbin-Watson stat	1.000875
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Output eviews 8

Dari hasil pengolahan regresi data panel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-Squared) dari hasil estimasi sebesar 0.658371, yang menunjukkan variabel-variabel independen mampu menjelaskan 65.8371% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan diluar model.

Tabel 4. 6 Ringkasan Hasil Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect

Variabel Bebas	Commen Effect	Fixed Effect	Random Effect
PAD	1.76	1.88	1.52
DAU	-1.59	-2.55	8.03
BM	2.89	-5.55**	-3.07
PP	-0.075344*	-0.432240***	-0.121853**
PM	-0.020884	-0.010409	-0.008351
PJ	-0.070376*	0.228482*	-0.032545
PK	0.617321***	-0.194023	0.413308**
PMA	1.24***	5.69*	6.94**
PMDN	9.13	4.83	3.74
TP	0.001268***	0.000502	0.001393*

Keterangan : *** Signifikan pada α = 1%

** Signifikan pada α = 5%

* Signifikan pada α = 10 %

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji t statistik

a. Pengujian terhadap pendapatan asli daerah

Dapat dilihat bahwa nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap gini sebesar 1.88, dengan t statistiknya 0.110173 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.9124 lebih dari (α) = 1,5,10% sehingga secara statistik variabel Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan mempengaruhi variabel gini (H0 menerima dan H1 ditolak) maka model estimasi *fixed effect*, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

b. Pengujian terhadap dana alokasi umum

Dapat dilihat dari hasil fixed effect diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh tidak signifikasn terhadap indeks gini dengan nilai koefisien dau terhadap gini sebesar -2.55 dengan t statistik -0.111992 dan probabilitasnya sebesar 0.9109 lebih dari (α) = 1,5,10%. Maka H0 menerima dan H1 ditolak. Sehingga pada model estimasi *fixed effect* dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

c. Pengujian terhadap belanja modal

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh Belanja Modal adalah -5.55 sementara t statistik -2.044303 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0419 kurang dari (α) = 5,10% sehingga secara statistik variabel Belanja Modal signifikan mempengaruhi indeks gini (H0 ditolak dan menerima H1) maka model estimasi fixed effect, Belanja Modal berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

d. Pengujian terhadap sektor pertanian

Dapat dilihat dari hasil *fixed effect* diketahui bahwa variabel angka sektor pertanian mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks gini dengan koefisien sektor pertanian -0.432240 dengan t statistik sebesar -4.276674 dan probabilitasnya sebesar 0.000 kurang dari (α) = 1,5,10% sehingga secara statistik variabel sektor pertanian (menolak H0 dan menerima H1) maka variabel sektor pertanian berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

e. Pengujian terhadap sektor manufaktur

Dapat dilihat bahwa nilai koefisien pada Sektor Manfukatur terhadap gini adalah sebesar -0.010409, dengan t statistik -0.371755 dan probabilitasnya sebesar 0.7104 lebih dari (α) = 1,5,10% ssehingga secara statistik variabel sektor manufaktur menerima H0 dan menolak H1) maka variabel sektor manufaktur tidak berpengaruhh terhadap ketimpangan pendapatan.

f. Pengujian terhadap sektor jasa

Dapat dilihat dari hasil *fixed effect* diketahui bahwa variabel angka sektor jasa mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks gini dengan koefisien sektor jasa 0.228482 dengan t statistik 0.120056 dan probabilitasnya sebesar 0.0581 kurang dari (α) = 10% sehingga secara statitsik variabel sektor jasa (menolak H0 dan menerima H1) maka variabel sektor jasa berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

g. Pengaujian terhadap sektor keuangan

Dapat dilihat dari hasil *fixed effect* diketahui bahwa variabel angka sektor keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks gini dengan koefisien sektor keuangan -0.194023 dengan t statistik -0.538316 dan probabilitasnya sebesar 0.5908 lebih dari (α) = 1,5,10% sehingga secara statistik variabel sektor keuangan (menerima H0 dan menolak H1) maka variabel sektor keuangan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

h. Pengujian terhadap penanaman modal asing (PMA)

Dapat dilihat dari hasil *fixed effect* diketahui bahwa variabel angka penanaman modal asing mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks gini dengan koefisien penanaman modal asing 5.69 dengan t statistik 1.685916 dan probabilitasnya sebesar 0.0929 kurang dari (α) = 10% sehingga secara statistik variabel penanaman modal asing (menolak H0 dan menerima H1) maka variabel penanaman modal asing berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

i. Pengujian terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Dapat dilihat dari hasil *fixed effect* diketahui bahwa variabel penanaman modal dalam negeri mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap indeks gini dengan koefisien penanaman modal dalam negeri 4.83 dengan t statistik 1.117871 dan probabilitasnya sebesar 0.2646 lebih dari (α) = 1,5,10% secara statistik variabel penanaman modal dalam negeri (menerima H0 dan menolak H1) maka variabel penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

j. Pengujian terhadap tingkat pendidikan

Dapat dilihat dari hasil fixed effect diketahui bahwa variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap indeks gini dengan koefisien tingkat pendidikan 0.000502 dengan t statistik 0.890232 dan probabilitasnya sebesar 0.3741 lebih dari (α) = 1,5,10% secara statistik variabel tingkat pendidikan (menerima H0 dan

menolak H1) maka variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

4.4.2 Uji F Statistik

Tabel 4. 7 Hasil uji F dari Estimasi Fixed Effect

R-squared	0.658371
Adjusted R-squared	0.607987
Sum squared resid	0.183795
F-statistic	13.06705
Prob (F-statistic)	0.000000

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dari tabel *fixed effect* GINI terlihat bahwa nilai F statistik sebesar 13.06705 dan probabilitas 0.000000 maka signifikan pada α = 1,5,10%, sehingga secara statistik PAD, DAU, BM, PP, PM, PJ, PK, PMA, PMDN dan TP secara bersama-sama mempengaruhi GINI. Sedangkan dengan melihat regresi estimasi *random effect* diperoleh F statistik 9.680670 dan probabilitas sebesar 0.000000 maka signifikansi pada α = 1,5,10% sehingga secara statistik PAD, DAU, BM, PP, PM, PJ, PK, PMA, PMDN dan TP secara bersama-sama mempengaruhi GINI.

4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan seberapa besar model digambarkan oleh variabel independen

dari penelitian terhadap variabel dependennya. Koefisien Determinasi (R^2) pada GINI terlihat bahwa nilai R *Square* GINI sebesar 0.658371 artinya variabel GINI dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu PAD, DAU, BM, PP, PM, PJ, PK, PMA, PMDN dan TP sebesar 65.83% dan sisanya 34.17% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

4.5 Interpretasi Hasil Analisis

4.5.1 Nilai Intersep

Nilai intersep bersama untuk GINI sebesar 0.375057 jika variabel bebasnya sama dengan nol atau tidak dipengaruhi oleh variabel independen yang ada. Sedangkan nilai intersep untuk masing-masing provinsi adalah sebesar:

Tabel 4. 8 Nilai Intersep

No	Provinsi	Gini Ratio
1.	Kepulauan Riau	0.2887
2.	Jawa Timur	0.294914
3.	Sumatra Barat	0.312659
4.	Aceh	0.313869
5.	Bali	0.322861
6.	Kep. Bangka Belitung	0.324348
7.	Kalimantan Timur	0.331316
8.	Jawa Barat	0.332192
9.	Banten	0.322861
10.	Sumatra Utara	0.340836
11.	Jawa Tengah	0.346638
12.	Sulawesi Utara	0.350765
13.	DIY	0.359094
14.	Maluku	0.364342
15.	Kalimantan Tengah	0.367596
16.	Kalimantan Barat	0.367984
17.	Sumatra Selatan	0.370007
18.	Riau	0.37039
19.	Kalimantan Selatan	0.378087

20.	Maluku Utara	0.378663
21.	Jambi	0.383979
22.	NTB	0.386915
23.	NTT	0.399856
24.	Bengkulu	0.41203
25.	Papua Barat	0.421576
26.	Papua	0.430509
27.	Sulawesi Tenggara	0.4390602
28.	Sulawesi Selatan	0.440061
29.	Sulawesi Tengah	0.449149
30.	Gorontalo	0.450724
31.	Sulawesi Barat	0.46783
32.	Lampung	0.470999

4.5.2 Analisi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

5. Dari regresi data panel menggunakan *fixed effect* di ketahui bahwa koefisien regresi pendapatan asli daerah 1.88 dengan nilai probabilitas 0.9124. Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2014), bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dalam artian pendapatan asli daerah meningkat, maka distribusi pendapatan akan meningkat.
6. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintahan daerah hendaknya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran pendapatan asli daerah dalam menekan ketimpangan dianggap belum mampu dikarenakan pendapatan asli daerah

sendiri lebih dialokasikan untuk belanja rutin seperti : belanja pegawai, belanja barang dan lain-lain yang bersifat rutin setiap satu tahun anggaran bukan unutk belanja pembangunan yang bersifat investasi sehingga bermanfaat di masa yang akan datang.

6.4.1 Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan

7. Dari regresi data panel menggunakan *fixed effect* diketahui bahwa koefisien regresi dana alokasi umum -2.55 dengan nilai probabilitas 0.9109. Jika dana alokasi umum mengalami kenaikan maka distribusi pendapatan akan membaik. Penyebaran dana alokasi yang besar dapat mengurangi kesenjangan antar kabupaten/kota. Bahl and Wallance (2003) mengungkapkan bahwa transfer antar pemerintah lokal merupakan instrument pemerataan untuk mengurangi ketimpangan. Kondisi yang terjadi pada setiap provinsi di Indonesia tidak mencerminkan transfer pemerintahan berupa DAU semakin merata. Terlihat dari DAU tiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi ketimpangan yang ada cenderung meningkat pula, ini berarti DAU belum mampu menekan ketimpangan. DAU dapat mengurangi ketimpangan dengan asumsi bahwa DAU untuk belanja pembangunan dari pada belanja rutin. Mengingat DAU sebagian besar digunakan untuk belanja rutin dari pada belanja pembangunan sehingga pengaruhnya tidak signifikan.

7.4.1 Analisi Pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari regresi panel menggunakan *fixed effect* diketahui bahwa koefisien regresi belanja modal -5.55 dengan nilai probabilitas 0.0419. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2014), bahwa belanja modal berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dalam artian jika belanja modal meningkat, maka ketimpangan distribusi pendapatan menurun.

Nuarisa (2012) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap pemerintah atau kekayaan serta menambah anggaran rutin untuk biaya operasional yang dapat memberi manfaat lebih dalam satu periode akuntansi. Belaja modal juga memungkinkan suatu daerah untuk membangun sarana dan prasarana, melakukan investasi dan meningkatkan kebutuhan publik. Pembangunan sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan perkapita di daerah bersangkutan. Sehingga belanja modal juga menjadi kontribusi besar dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

7.4.2 Analisis Pengaruh Sumbangan Sektor Pertanian terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari regresi data panel menggunakan *fixed effect* di ketahui bahwa koefisien regresi sumbangan sektor pertanian sebesar -0.432240 dengan nilai probabilitas 0.0000. Dengan nilai koefsien negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pada sektor pertanian akan menurunkan

ketimpangan pendapatan. Sumbangan sektor pertanian bagi masyarakat indonesia merupakan sumber pendapatan bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah. Dengan demikian sumbangan sektor pertanian dapat mengurangi jumlah pengangguran dan pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dapat secara efektif dilakukan melalui pembangunan pertanian. Hal ini sesuai dengan penelitian Linda (2007), bahwa sumbangan sektor pertanian memiliki peran yang besar dalam penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Sumbangan sektor pertanian merupakan sumber pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga berpendapatan rendah karena sebgaian besar masyarakat Indonesia menggantukan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan demikian upaya pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dapat secara efektif dilakukan melalui pembangunan pertanian.

7.4.3 Analisis Pengaruh Sumbangan Sektor Manufaktur terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari regresi data panel menggunakan *fixed effect* diketahui bahwa koefisien regresi sumbangan sektor industri pengolahan atau manufaktur adalah sebesar -0.010409 dan nilai probabilitasnya 0.7104 yang berarti jika sektor maufaktur mengalami peningkatan maka terjadi penurunan ketimpangan pendapatan. Ini berarti sumbangan sektor industri pengolahan atau manufaktur berperan dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dikarenakan kenaikan porsi sektor manufaktur diikuti kenaikan porsi tenaga kerja sehingga tidak timpang.

7.4.4 Analisis Pengaruh Sektor Jasa terhadap Ketimpangan Pendapatan

Nilai koefisien regesi sektor jasa sebesar 0.228482 dan nilai probabilitas sebesar 0.0581 yang artinya sumbangan sektor jasa meningkat maka distribusi ketimpangan pendapatan memburuk. Pertumbuhan ekonomi sumbangan sektor jasa yang pesat pada umumnya disumbang oleh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Menurut penelitian yang dilakukan Linda (2007) tingginya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi ini utamanya disumbang oleh tingginya pertumbuhan ekonomi sub sektor komunikasi. Hal ini dikarenakan semakin tumbuh pesatnya produk-produk alat komunikasi. Namun sayangnya hal tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepuasan pribadi dan belum menyentuh usaha produktif, sehingga tidak berdampak kepada pemertaan pendapatan antar daerah.

Selain sektor pengangkutan dan komunikasi, pertumbuhan ekonomi sektor jasa juga disumbang oleh pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada sektor jasa memperburuk ketimpangan dikarenakan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran menandakan semakin tingginya konsumsi masyarakat, yang mana tidak berdampak pada pemerataan distribusi pendapatan.

7.4.5 Analisis Pengaruh Sumbangan Sektor Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Nilai koefisien regresi sektor keuangan sebesar -0.194023 menunjukkan bahwa jika sumbangan sektor keuangan mengalami

peningkatan maka terjadi penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang digunakan jika jasa yang dihasilkan meningkat per satuan waktu maka produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini akan meningkatkan kesejahteraan sehingga distribusi pendapatan semakin membaik. Selain itu dalam sektor KRJP memerlukan tenaga kerja dengan ketrampilan khusus sehingga gaji yang diperoleh relatif tinggi sehingga kesejahteraan tenaga kerjanya terjamin (Kamaluddin, 1992).

7.4.6 Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan model estimasi *fixed effect*, diketahui bahwa variabel penanman modal asing mempunyai pengaruh yang signifikan pada taraf 10 persen terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0929 dan memiliki koefisien yang positif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi sebesar 5.69 artinya apabila penanaman modal asing meningkat sebesar 1 persen, maka ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 5.69 persen.

Penanaman modal asing bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi penanamaman modal asing pun mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini sejalan dengan penelitian Nunnenkam (2011) yang menyatakan bahwa penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif dalam jangka waktu pendek dan berpengaruh negatif dalam jangka waktu panjang terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan. Artinya pada saat penanaman modal asing meningkat (jangka pendek) maka ketimpangan distribusi akan meningkat, itu dikarenakan dalam jangka pendek (pengalaman eropa) mengarah pada kesimpulan bahwa penanaman modal asing umumnya memperdalam kesenjangan antar segmen kaya dan miskin, dan dalam jangka panjang penanaman modal asing akan relatif sedikit mengakibatkan resiko konflik sosial dan itu akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

7.4.7 Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan model estimasi *fixed effect* diketahui bahwa variabel penanaman modal dalam negeri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Nilai koefisien regresi penanaman modal dalam negeri adalah sebesar 4.83 dan nilai probabilitasnya 0.2646 menunjukkan peningkatan sebesar 1 persen pada variabel ini akan meningkatkan rasio gini 4.83 persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penanaman modal dalam negeri dapat memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan.

7.4.8 Analisis Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect* diketahui bahwa koefisien regresi tingkat pendidikan sebesar 0.000502. Hal ini berarti bahwa indeks gini akan meningkat sebesar 0.000502 jika tingkat pendidikan meningkat sebesar satu persen, maka krtimpangan pendapatan anak naik sebesar 0.0502. Hal ini dikarenakan semakin banyak penduduk yang bersekolah di

umur 18-24 distribusi pendapatan akan semakin timpang karena ketika banyak penduduk yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi maka semakin banyak pula persaingan di dunia kerja. Hal ini juga sesuai penelitian yang dilakukan Masri (2015) dan Nurul (2014) bahwa tingkat pendidikan menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Todaro (2003) mengatakan bahwa sistem pendidikan di negara berkembang kadang-kadang bukan mengurangi, namun justru memperburuk ketimpangan pendapatan. Alasan utama dari efek buruk pendidikan formal atas distribusi pendapatan adalah adanya korelasi yang positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan penghasilannya seumur hidup. Tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jelas ketimpangan pendapatan akan bertambah buruk mengingat para pelajar dari keluarga yang berpenghasilan tinggi jauh lebih besar peluangnya untuk melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang tertinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis *Eviews* 8 dengan metode data panel, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel yang berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan adalah DAU, belanja modal, sumbangan sektor pertanian, sumbangan sektor manufaktur, sumbangan sektor keuangan. Sedangkan PAD, sektor jasa, PMA, PMDN, pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Kenaikan pendapatan pada DAU, belanja modal, sumbangan sektor pertanian, sumbangan sektor manufaktur, sumbangan sektor keuangan dapat memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan kenaikan pada PAD, sekor jasa, PMA, PMDN, pendidikan dapat memperburuk distribusi pendapatan.
3. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapaan di Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa perubahan jumlah pendapatan asli daerah tidak akan berpengaruh terhadap perubahan ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil ini disebabkan karena peran pendapatan asli daerah dalam menekan ketimpangan dianggap belum mampu dikarenakan pendapatan asli daerah sendiri lebih dialokasikan untuk belanja rutin.
4. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa perubahan tingkat dana alokasi umum tidak akan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil ini disebabkan karena DAU alokasinya cukup merata, penggunaanya relatif baik. Sehingga tidak menyebabkan ketimpangan.
5. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa dalam tingkat belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi di Indonesia. Hasil ini disebabkan

karena dengan adanya belanja modal dapat membangun sarana dan prasarana dengan baik yang dapat meningkatkan investor kemudian meningkatkan pendapatan perkapita. Sehingga belanja modal dapat berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan.

6. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa sumbangan sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi di Indonesia. Hasil ini disebabkan karena Indonesia memiliki provinsi-provinsi yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian, dengan adanya sektor pertanian mampu menjangkau kebutuhan manusia yang akan meningktkan pendapatan rumah tangga.
7. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa sumbangan sektor manufaktur tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa perubahan pada sektor manufaktur tidak akan berpengaruh terhadap perubahan ketimpangan pendapatan. Hasil ini berarti bahwa porsi kenaikan sektor manufaktur naik diikuti kenaikan tenaga kerja sehingga tidak timpang.
8. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa sumbangan sektor jasa berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi di Indonesia. Hasil ini disebabkan karena sumbangan sektor jasa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan porsi PDB jasa mengurangi ketimpangan karena kenaikan

sumbangan sektor jasa diikuti penyerapan tenaga kerja yang lebih besar porsinya.

9. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa dalam sumbangan sektor keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi di Indonesia. Hali ini berarti bahwa perubahan tingkat pada sektor keuangan tidak akan berpengaruh terhadap perubahan ketimpangan pendapatan. Hasil ini disebabkan karena kenaikannya diikuti kenaikan yang seimbang sehingga tidak berpengaruh dan proporsinya sama.
10. Pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa dalam tingkat PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa perubahan tingkat PMDN tidak akan berpengaruh terhadap perubahan ketimpangan pendapatan.
11. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa tingkat PMA berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi di Indonesia.
12. Tingkat pendidikan dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Karena semakin banyak penduduk yang berumur 18-24 tahun yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi maka sejalan dengan itu semakin meningkat pula persaingan di dunia kerja. Berdampak memperburuk ketimpangan karena yang mampu kuliah di perguruan tinggi dari keluarga berpendapatan menengah keatas

sehingga semakin banyak jumlahnya pendapatan keluarga menengah keatas semakin timpang.

5.2 Implikasi

1. Kegiatan ekonomi sektor manufaktur, sekor jasa, sektor pertanian , tiga sektor tersebut diharapkan dapat dioptimalkan dalam sisi peneimaannya kemudian didukung dengan mengoptimalkan DAU dan pengalokasian yang efisien dari belanja modal agar dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Adapun langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengoptimalkan sektor-sektor tersebut yaitu dengan cara diantaranya adalah penelitian, penyuluhan, pada sektor pertanian. Kemudian infastruktur dan didukung pemanfaatan teknologi yang tepat guna serta inovasi dalam sektor manufaktur.
2. Sekor pertanian, manufkatur dan keuangan dapat memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan. Sektor pertanian, manufaktur dan keuangan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sehingga ketika kesejahteraan tenaga kerja sektor ini meningkat maka distribusi pendapatan akan membaik. Dengan demikian, sektor pertanian, manufkatur dan keuangan perlu mendapatkan prioritas pengembangan, sehingga memberikan dampak yang positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat ditambahkan variabel yang diduga berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Seperti tingkat kesehatan, inflasi, upah minimum,dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin (2004). " *Ekonomi Pembangunan*". Peneribit STIE YKPN

Badan Pusat Statistik. 2015. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2010-2014. Indonesia : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Indonesia : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Keuangan Indonesia 2007-2008. Indonesia : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2009. *Statistik Keuangan Indonesia 2009-2010*. Indonesia : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Keuangan Indonesia 2011-2012*. Indonesia : Badan Pusat Stataistik.

Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Keuangan Indonesia 2014-2015*. Indonesia : Badan Pusat Statistik.

Budi, S (2014), "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan" Jurnal Ekonomi, Vol 7, No. 1, 46-59.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1954. Ekonomi Pembangunan. PT Pembangunan : Jakarta.

Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika dasar : Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga

Hakim, Abdul (2012)."Ekonomi Pembangunan". UII Yogyakarta : Ekonisia

Irfan, R. (2014), "*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Sumatra"*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kementrian Keuangan (2014) . Diambil 5 November 2017 dari https://www.kemenkeu.go.id/kajian/kajian-profil-sektor-riil-sektor-perdagangan-hotel-dan-restoran

Machmud, Amir (2016) "*Perekonomian Indonesia*". Jakarta: Erlangga.

Masri, dkk. (2015),"Analisis Pengaruh Aggregat Demand dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh" Jurnal Ekonomi, Volume 3, No3, 23-32.

Puja, W. (2013),"Pengaruh PMA, PMDN, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Pulau Jawa Periode 2004-2009", Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sukirno, Sadono. (2004), "*Makroekonomi Teori Pengantar*", Edisi Ketiga. Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Todaro M.P dan Smith SP. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisis kesembilan : Terjemahaan Bahasa Indonesia Pearson Education Limited dan Erlangga.

Usman, Wan. (1998). " *Ekonomi Indonesia*" . Jakarta: Karunia Jakarta Universitas Terbuka.

Valentina, Putu dan Shanty. (2014), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan" Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 4, No. 1, 41-49.

Vebryna (2016), "*Pengaruh Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan"*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Widarjono, Agus. (2009). *" Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya"*. UII Yogyakarta: Ekonisia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Provinsi	Tahun	Indeks_Gini	DAU	PAD	BM	PP	PM	PJ	PK	TP	PMDN	PMA
Aceh	2007	0,27	146810,8849	8789,575105	82612,33246	0,226718172	0,124836728	0,369591196	0,01417336	23,6	0	17,4
Aceh	2008	0,27	162994,1894	12265,20423	86702,40759	0,241187166	0,121561382	0,400492698	0,015572761	23,13	0	0
Aceh	2009	0,29	196272,5466	12688,57091	60631,66408	0,259101772	0,117787641	0,442937397	0,017846612	22,82	79,7	0,4
Aceh	2010	0,3	192801,7755	15544,82614	47463,15762	0,266833746	0,105410955	0,455160336	0,018358597	24,11	40,9	4,6
Aceh	2011	0,33	223759,9337	14009,91021	69095,00736	0,262708453	0,102070155	0,458481886	0,018602645	27,68	259,4	22,5
Aceh	2012	0,32	254046,823	19207,57803	55979,29188	0,271102828	0,098498136	0,463823723	0,018992545	28,55	60,2	172,3
Aceh	2013	0,34	279574,6594	27528,77092	71585,50401	0,268723858	0,091231947	0,474706022	0,019493331	29,18	3636,4	94,2
Aceh	2014	0,32	301792,9976	32826,17455	135631,3858	0,271099943	0,08294907	0,489663748	0,020283923	32,93	5110,3	31,1
Aceh	2015	0,33	313048,5115	58750,68549	171569,6991	0,286560543	0,077218163	0,514535491	0,021607516	33,07	4192,4	21,1891
Aceh	2016	0,33	322818,1511	59327,18276	186654,467	0,288117611	0,070450642	0,520814388	0,022683642	33,94	2456,1	134,5
Sumut	2007	0,31	91262,04483	7431,311398	36978,89528	0,239057239	0,236642216	0,381273048	0,047548902	14,42	1521,3	189,7
Sumut	2008	0,31	89512,01507	7702,466215	38302,88133	0,238302001	0,228920996	0,385402931	0,061033041	14,6	382,7	127,2
Sumut	2009	0,32	90291,86235	8371,016798	32239,47301	0,237784491	0,223890497	0,389811669	0,061617619	14,68	2060,7	139,7
Sumut	2010	0,35	91566,69065	9404,138611	25868,35091	0,236343254	0,219274956	0,393455888	0,064429666	15,65	662,7	181,1
Sumut	2011	0,35	101968,075	15457,48066	36618,40949	0,232429953	0,209954844	0,401230516	0,068943702	16,94	1673	753,7
Sumut	2012	0,33	113487,7936	20086,11	42915,68388	0,228904821	0,20461543	0,405794946	0,072593	17,27	2550,3	645,3
Sumut	2013	0,35	122691,8472	18537,6424	49294,75167	0,224573269	0,200761907	0,411696612	0,07431053	21,81	5068,9	887,5
Sumut	2014	0,32	127639,7109	23328,39174	50958,09948	0,222743001	0,196507744	0,417283934	0,074012094	24,82	4223,9	550,8
Sumut	2015	0,34	123881,0264	23202,86086	49445,98116	0,223525531	0,19376019	0,417996232	0,074908173	25,16	4287,417	1246,1
Sumut	2016	0,32	127084,0616	27366,01525	52049,10195	0,222854213	0,1924905	0,419808191	0,074883889	26,62	4864,2	1014,7
Sumbar	2007	0,31	158085,0968	13538,45903	56831,60095	0,244249992	0,1278826	0,485279373	0,049949868	20,88	0	58,7
Sumbar	2008	0,29	167208,5599	13476,99033	67116,04295	0,241038178	0,1269011	0,486937488	0,050345396	21,22	0	28,1
Sumbar	2009	0,3	164003,9803	14595,62451	44926,10951	0,239184363	0,127334187	0,490554208	0,050350299	20,58	459	0,2
Sumbar	2010	0,33	160059,6118	14992,01475	48101,03791	0,234997427	0,123211529	0,495985589	0,050231601	21,26	73,8	7,9
Sumbar	2011	0,35	171379,8821	17115,6002	43777,35578	0,229746099	0,121402268	0,503706755	0,049520302	23,95	1026,2	22,9

Sumbar	2012	0,36	182998,4322	18376,09218	58699,11449	0,225788827	0,118676866	0,510107909	0,049332969	27,55	885,3	75
Sumbar	2013	0,36	224876,3326	23007,60568	63372,40444	0,220283019	0,11719554	0,517174099	0,049421098	30,66	677,8	91,4
Sumbar	2014	0,33	212362,6862	23080,39656	67540,43483	0,220230863	0,116464156	0,518955043	0,049048198	32,89	421,1	112,1
Sumbar	2015	0,34	208172,1995	30256,11908	66064,42259	0,217801831	0,112403324	0,526666283	0,048457981	33,13	1552,5	57,1334
Sumbar	2016	0,33	213448,1991	30907,6442	89508,31459	0,210961002	0,112016627	0,534777298	0,049262521	34,71	3795,6	79,3
Riau	2007	0,32	27285,07637	9605,378748	54862,27789	0,171505457	0,107257606	0,15366592	0,010984422	13,44	3095,3	724
Riau	2008	0,31	22089,8325	12031,08932	66894,62424	0,170104847	0,108810452	0,159554263	0,011846078	13,77	1966,8	460,9
Riau	2009	0,33	22203,80102	11196,72203	55706,09037	0,171358198	0,110976052	0,168383341	0,012688461	13,14	3386	251,6
Riau	2010	0,33	17738,5797	10161,93719	46330,47332	0,170847534	0,1136459	0,177039516	0,013386963	14,02	1037,1	86,6
Riau	2011	0,36	38956,3924	11253,12469	38840,65097	0,169717171	0,115724227	0,184667563	0,013975791	15,34	7462,6	212,3
Riau	2012	0,4	45414,24875	10485,93781	55750,32446	0,168082484	0,115212749	0,201855144	0,015428179	15,81	5450,4	1152,9
Riau	2013	0,37	52760,31857	15119,43596	60141,97592	0,171142263	0,119277915	0,209446884	0,016264337	22,04	4874,3	1304,9
Riau	2014	0,35	55706,23904	16893,42712	85693,15818	0,176874392	0,122671237	0,212875927	0,01663944	24,48	7707,6	1369,5
Riau	2015	0,36	51547,7505	19032,83437	57130,27524	0,177244954	0,12683257	0,21874165	0,017288063	24,85	9943,044	653,395
Riau	2016	0,35	53820,18263	25052,21642	66687,90373	0,180272879	0,12978323	0,222241584	0,017521085	26,18	6613,7	869,1
Jambi	2007	0,31	190439,4953	14275,4082	117994,3354	0,310823117	0,136462347	0,344308231	0,041751313	12,31	4751,8	17,6
Jambi	2008	0,28	190358,0612	14016,82259	123876,3121	0,306641391	0,134527389	0,334488168	0,048437704	12,77	1300,6	36,1
Jambi	2009	0,27	183079,4997	16070,82108	106384,2308	0,307403994	0,131305684	0,336282642	0,053763441	11,83	213,9	40,5
Jambi	2010	0,3	185093,0145	17710,20451	86985,05043	0,301299296	0,127811802	0,33541297	0,056207429	12,81	223,3	37,2
Jambi	2011	0,34	201355,3	22561,51888	99554,08501	0,294272756	0,123826601	0,330608586	0,056534121	15,64	2134,9	19,5
Jambi	2012	0,34	228251,3864	20570,70953	122517,8825	0,29468931	0,12432512	0,331942672	0,056738981	15,22	1445,7	156,3
Jambi	2013	0,35	244043,4506	27567,91073	140941,218	0,293416443	0,12179808	0,337412985	0,056735975	20,25	2799,6	34,3
Jambi	2014	0,33	246311,7751	27236,8298	139384,2463	0,303229361	0,118876081	0,340735718	0,054543143	22,11	908	51,4
Jambi	2015	0,36	233684,5697	36672,24012	111340,5377	0,306165609	0,116764275	0,35598666	0,053847405	22,22	3540,242	107,732
Jambi	2016	0,35	257985,5351	38634,53111	114375,3678	0,31270701	0,114405954	0,362857032	0,055722246	23,86	3884,4	61
Sumsel	2007	0,32	80376,54687	6644,169465	73437,70645	0,20111469	0,17737324	0,267037024	0,035738844	12,04	811,5	213,8
Sumsel	2008	0,3	82219,6373	7358,431723	76800,97813	0,199225006	0,174580212	0,278016017	0,036975803	12,3	378,5	114,7
Sumsel	2009	0,31	80346,57428	8412,369146	51550,4478	0,197293765	0,17125701	0,281507948	0,037781417	11,61	580,3	56,8
Sumsel	2010	0,34	74883,91456	10483,53097	53242,89492	0,195480598	0,1695324	0,288280247	0,038397695	12,07	1738,4	186,3
Sumsel	2011	0,34	90636,36441	14083,02214	60146,1248	0,193218744	0,168428637	0,294246519	0,039037803	12,75	1068,9	557,3

Sumsel	2012	0,4	101318,7534	14825,69968	65781,06536	0,192007878	0,168331114	0,303248447	0,040196405	13,91	2930,6	786,4
Sumsel	2013	0,38	111787,3558	18081,27574	92156,74355	0,189883523	0,169414998	0,308951708	0,041224971	14,08	3396	485,9
Sumsel	2014	0,4	115295,7565	20669,79088	929197,2995	0,188547521	0,169052079	0,315511428	0,041538654	16,87	7042,8	1056,5
Sumsel	2015	0,36	112846,1045	25109,28169	71950,29171	0,187065676	0,170643606	0,322150059	0,042077816	17	10944,09	645,822
Sumsel	2016	0,35	120594,9973	28244,73263	80102,18455	0,180867783	0,172599932	0,326420681	0,043241089	18,07	8543,1	2793,5
Bengkulu	2007	0,34	304738,3828	12945,83189	170342,3152	0,393917863	0,040642319	0,45530766	0,041352849	16,46	0	0
Bengkulu	2008	0,33	321412,688	18412,40555	175958,5686	0,39275128	0,039611964	0,453247103	0,041363514	16,07	0	13
Bengkulu	2009	0,3	309535,3076	16212,26399	139818,245	0,392748092	0,041348601	0,452544529	0,04173028	15,97	0	1,1
Bengkulu	2010	0,37	323398,11	23955,96437	98741,71053	0,37943858	0,042346449	0,461252399	0,042466411	16,95	8,5	25,1
Bengkulu	2011	0,36	343932,1219	15587,79795	114992,8671	0,37433758	0,04397339	0,467132709	0,043747886	17,02	0	43,1
Bengkulu	2012	0,35	380641,5634	20274,16799	125666,3017	0,370839937	0,0439514	0,468885367	0,044268357	19,64	52,6	30,4
Bengkulu	2013	0,39	409500,3766	23096,06049	125498,4657	0,363808197	0,044568245	0,476721051	0,044966176	24,12	109,6	22,3
Bengkulu	2014	0,36	435773,0929	27184,63186	151412,1532	0,35332956	0,044519902	0,484436899	0,045085833	28,14	7,8	19,3
Bengkulu	2015	0,38	430683,2332	36861,98062	168745,8502	0,343679914	0,044316857	0,495469633	0,045034538	28,37	553,9157	20,5784
Bengkulu	2016	0,36	443189,7244	40377,93883	192920,8258	0,336712959	0,044559939	0,502257817	0,045156343	28,93	949,1	55,7
Lampung	2007	0,39	128785,7719	6118,581526	49444,73088	0,425508488	0,132374981	0,292888821	0,071081205	8,71	163,8	124,5
Lampung	2008	0,35	134435,1329	5839,894202	44543,24452	0,415991638	0,132828151	0,297418924	0,076909677	9,06	735,2	67
Lampung	2009	0,35	132198,6485	6306,698671	33538,58934	0,405284643	0,13457083	0,304997793	0,082469109	8,97	549,9	32,7
Lampung	2010	0,36	137934,1865	6978,415394	32173,73219	0,386966491	0,134921049	0,307493877	0,099041117	9,82	272,3	30,7
Lampung	2011	0,37	155706,8607	12232,60611	50533,25626	0,381787455	0,132993705	0,313943521	0,099977957	10,39	824,4	79,5
Lampung	2012	0,36	174097,6493	13411,7222	59154,32931	0,373170676	0,130241	0,31973258	0,105428814	11,9	304,2	114,3
Lampung	2013	0,36	187166,4898	19185,58344	66005,50274	0,366064653	0,132211695	0,321943499	0,108904451	16,19	1325,3	46,8
Lampung	2014	0,35	196928,746	21230,4088	76241,56644	0,359798622	0,131370445	0,329674411	0,108942351	18,67	3495,7	156,5
Lampung	2015	0,38	197654,4237	24923,14647	74634,25219	0,354032147	0,134417993	0,334523973	0,107824858	18,81	1102,294	257,726
Lampung	2016	0,36	207953,7293	30212,54011	97529,02066	0,34733836	0,132820666	0,339368374	0,110609228	19,72	6031,8	85,7
KepBabel	2007	0,26	149760,0632	17103,70713	13856,45462	0,226730058	0,22725832	0,292974115	0,031801373	8,41	313,7	0
KepBabel	2008	0,26	225597,2545	16404,93162	15563,53242	0,228484848	0,224646465	0,298686869	0,031616162	8,75	2	1,7
KepBabel	2009	0,29	156751,3059	21199,97069	109388,3333	0,225316456	0,221518987	0,301850049	0,033300876	8,25	249,3	22,4
KepBabel	2010	0,3	148137,5543	18574,51301	83716,46199	0,229157092	0,216931703	0,306829672	0,03437816	8,9	0,4	22
KepBabel	2011	0,3	165566,5677	23695,71119	65487,60639	0,226263499	0,210194384	0,315766739	0,03524838	8,63	514,4	146

KepBabel	2012	0,29	18719,1437	21499,00963	87433,04226	0,23031737	0,202904463	0,319082973	0,036958473	9,3	533,5	59,2
KepBabel	2013	0,31	203249,7016	30051,19388	93254,77133	0,235025184	0,200154979	0,322200697	0,037659822	9,46	608,2	112,4
KepBabel	2014	0,3	215821,5252	28881,59122	92900,55035	0,245224345	0,193617651	0,325929217	0,049089294	12,22	615,5	105
KepBabel	2015	0,28	216039,9277	44232,14006	107810,8118	0,249679898	0,188362498	0,331697254	0,048726704	12,73	1023,739	82,6631
KepBabel	2016	0,28	222024,4242	42130,87852	125599,985	0,25	0,185569828	0,337045641	0,049125444	13,81	2202	52,7
KepRiau	2007	0,3	32559,57248	16673,70966	37785,42314	0,04721438	0,525004321	0,283459123	0,04522671	7,58	97,1	52,8
KepRiau	2008	0,3	22561,77728	11670,50512	27526,97596	0,046791841	0,514845333	0,290557882	0,04652168	10,99	74,4	161,4
KepRiau	2009	0,29	30335,91333	17903,45207	34684,15264	0,045069026	0,509068608	0,293588037	0,047443827	7,07	240	230,7
KepRiau	2010	0,29	23130,43816	15333,97013	27469,88877	0,043821209	0,508228649	0,297862499	0,046450482	8,64	166,9	165,7
KepRiau	2011	0,32	32115,04649	19896,17299	31269,47559	0,042700322	0,507565557	0,300134651	0,046443161	9,67	1370,4	219,7
KepRiau	2012	0,35	36270,77298	18126,58284	36028,57091	0,040729107	0,502233049	0,306558113	0,046648289	10,14	43,5	537,1
KepRiau	2013	0,36	43935,61324	24669,06536	35756,08638	0,039080275	0,500030201	0,309541547	0,046328548	14,85	417,7	315,7
KepRiau	2014	0,4	43852,55356	21729,83812	46969,82637	0,039418264	0,496968552	0,309812069	0,046066673	17,4	28,5	392,1
KepRiau	2015	0,36	37112,47474	29932,66525	25001,14158	0,039340757	0,495109131	0,312944321	0,044935412	17,69	612,0547	640,421
KepRiau	2016	0,35	50388,22436	26867,59068	35187,87904	0,039354718	0,487218198	0,321385557	0,045054367	18,58	492,5	519,1
JawaBarat	2007	0,34	54050,07376	8471,198184	18082,21353	0,13015902	0,447527172	0,317652637	0,026774382	10,2	11347,9	1326,9
JawaBarat	2008	0,35	53870,0535	8232,430561	17048,48017	0,125357994	0,459320893	0,307510834	0,026658105	10,54	4289,5	2552,2
JawaBarat	2009	0,36	56815,31373	10013,9805	15554,52795	0,137512566	0,433193257	0,321425158	0,02691452	10,01	4724,9	1934,4
JawaBarat	2010	0,36	54098,98305	10249,98489	15328,79723	0,130769279	0,420809747	0,338010204	0,027887432	10,38	15799,8	1692
JawaBarat	2011	0,41	56756,15019	17081,66133	17562,01075	0,122703731	0,4197184	0,34654383	0,029687186	11,15	11194,3	3839,4
JawaBarat	2012	0,41	66477,81714	15615,00045	24934,58806	0,114290558	0,409230845	0,360872941	0,030821431	12,25	11384	4210,7
JawaBarat	2013	0,41	70118,16223	26369,10343	30271,0469	0,111912191	0,407515788	0,366723624	0,031589369	17,34	9006,1	7124,9
JawaBarat	2014	0,41	72910,35793	28334,17873	30643,22758	0,106793561	0,407839973	0,375854791	0,031362845	19,27	18726,9	6562
JawaBarat	2015	0,41	71566,85106	38420,54097	30977,79096	0,101837692	0,405315654	0,382215113	0,03187097	19,4	26272,87	5738,71
JawaBarat	2016	0,41	71886,93316	38015,10203	38808,06839	0,101958907	0,401847432	0,387714668	0,033232053	20,37	30360,2	5470,9
JawaTengah	2007	0,33	103565,7965	13192,6449	30351,95917	0,200257683	0,319722205	0,368650619	0,034824964	10,28	276,5	100,7
JawaTengah	2008	0,31	103467,2334	11522,32184	28742,16562	0,199269196	0,316358594	0,370550008	0,035582085	10,55	1336,3	135,6
JawaTengah	2009	0,32	103301,4109	15037,80861	22931,43123	0,193017609	0,325143061	0,367650971	0,036400582	10,2	2642,6	83,1
JawaTengah	2010	0,34	97890,79274	14314,04274	14504,54877	0,18693548	0,328286853	0,36999385	0,03605444	11,34	795,4	59,1
JawaTengah	2011	0,38	102285,1166	18808,86395	23489,25602	0,17858404	0,330123193	0,376267493	0,036251551	11,51	2737,8	175

JawaTengah	2012	0,38	116261,023	18354,23999	32181,74087	0,174115951	0,327306875	0,38183905	0,037292267	11,83	5797,1	241,5
JawaTengah	2013	0,39	124684,1482	27310,48659	32956,99929	0,168148812	0,327619901	0,384881219	0,038987001	17,42	12593,6	464,3
JawaTengah	2014	0,38	128270,1112	25852,83962	39122,73754	0,15820063	0,331780635	0,39062846	0,039014732	20,48	13601,6	463,4
JawaTengah	2015	0,38	125533,2787	38852,65989	44853,23242	0,158398534	0,329703914	0,391860249	0,039891319	20,57	15410,71	850,398
JawaTengah	2016	0,37	129510,7849	35196,5088	50382,18994	0,153658256	0,325987422	0,395037963	0,041115116	21,59	24070,4	1030,8
DIY	2007	0,37	124119,6222	19669,56391	28225,60753	0,182210803	0,138202493	0,479389897	0,088727312	43,38	33,1	0,8
DIY	2008	0,36	129870,6007	17023,75203	36000,59463	0,183218822	0,133562357	0,481521965	0,089319176	43,47	0	16,7
DIY	2009	0,38	124202,512	24183,57875	22158,82042	0,181568979	0,130133573	0,485496411	0,09080941	43,3	32,9	8,1
DIY	2010	0,41	117129,0919	23771,40814	16034,34148	0,172638282	0,132769435	0,48987835	0,100551226	44,03	10	4,9
DIY	2011	0,4	122420,4321	31299,95395	22200,89932	0,160777225	0,134794397	0,494984184	0,094487122	44,17	1,6	2,4
DIY	2012	0,43	142402,4398	29732,95041	28826,42619	0,159037282	0,12505899	0,501608821	0,098717234	44,69	334	84,9
DIY	2013	0,44	151945,9183	50514,54085	34205,09875	0,152450239	0,12845874	0,506355499	0,100053133	45,86	283,8	29,6
DIY	2014	0,42	155722,4572	48037,27387	46007,87435	0,141891104	0,126812017	0,511523066	0,102677704	49,08	703,9	64,9
DIY	2015	0,43	151061,9232	70773,00378	54889,43255	0,13808554	0,123384558	0,516200704	0,104462137	49,17	362	89,1058
DIY	2016	0,42	153619,9839	63881,08964	55284,13286	0,133354484	0,123413706	0,518859278	0,104519177	49,95	948,6	1030,8
JawaTimur	2007	0,34	61307,6202	8582,351996	18776,19825	0,166235558	0,264087877	0,459913871	0,039084063	11,34	1724,7	1689,6
JawaTimur	2008	0,33	63849,22566	7873,084382	22791,88098	0,161802585	0,260150095	0,468087544	0,040112719	11,66	2778,3	457,1
JawaTimur	2009	0,33	61626,16075	10397,85145	22492,4076	0,15648209	0,259613976	0,475607818	0,040434955	11,07	4290,7	422,1
JawaTimur	2010	0,34	58658,18825	10383,05498	15533,17296	0,149964503	0,253887887	0,486795937	0,041007243	12,43	8084,1	1769,2
JawaTimur	2011	0,37	60500,71637	13853,1578	16236,33465	0,143406797	0,251158089	0,494841737	0,042042705	12,69	9687,5	1312
JawaTimur	2012	0,36	69803,8899	13688,19833	24403,32032	0,138351839	0,248987078	0,502437364	0,042909798	14,59	21520,3	2298,8
JawaTimur	2013	0,36	73776,84203	21449,74373	23770,204	0,131917755	0,246757489	0,510380804	0,04373337	19,49	34848,9	3396,3
JawaTimur	2014	0,37	75807,17948	22241,24075	31255,83847	0,12902107	0,250301235	0,509361381	0,044141395	21,84	38132	1802,5
JawaTimur	2015	0,42	73245,4853	31522,31885	34887,67332	0,126286718	0,250547982	0,512012925	0,044466072	21,95	35489,79	2593,38
JawaTimur	2016	0,4	73309,90675	27558,05289	37042,60186	0,122461443	0,248097662	0,515601903	0,044778504	22,67	46311,6	1941
Banten	2007	0,37	38896,96085	9925,725547	21609,7607	0,069568679	0,41800929	0,289250166	0,027856669	11,5	1068,7	708,6
Banten	2008	0,34	41175,7618	9459,126686	17569,91131	0,06786615	0,40432366	0,301125456	0,030940641	11,63	1989,1	477,7
Banten	2009	0,37	42855,43867	11393,15238	18909,65295	0,073825101	0,520430417	0,309847341	0,033395643	11,51	4381,7	1412
Banten	2010	0,42	42486,84972	10431,84266	15145,20275	0,075864718	0,507319883	0,318200303	0,033696315	11,7	5852,5	1544,2
Banten	2011	0,4	47325,40987	23840,37458	22769,38315	0,073337437	0,499182781	0,328192991	0,033898665	13,56	4298,6	2171,7

Banten	2012	0,39	55570,59607	18980,76827	30241,75909	0,072085767	0,485218818	0,342337387	0,034462757	15,97	5117,5	2716,3
Banten	2013	0,4	58712,08993	35476,20797	36403,65651	0,073099305	0,476288543	0,348804036	0,035349909	18,08	4008,7	3720,2
Banten	2014	0,4	60473,64227	43430,92174	40451,71376	0,070972594	0,45906116	0,357584765	0,03600111	19,61	8081,3	2034,6
Banten	2015	0,4	59558,96982	53407,15585	41860,2175	0,071736194	0,450532181	0,360532776	0,036704807	19,68	10709,9	2541,97
Banten	2016	0,39	58822,65493	47414,09809	50190,70307	0,072951468	0,441065866	0,363724398	0,038073565	20,74	12426,3	2912,1
Bali	2007	0,33	116819,6728	32891,29395	34752,93963	0,200327198	0,093660532	0,545766871	0,066748466	13,1	15,7	50,4
Bali	2008	0,3	119916,8355	32321,88244	45547,12713	0,190196835	0,095600154	0,554341953	0,064955616	13,53	29	81
Bali	2009	0,31	117045,481	53597,44315	45675,22714	0,206881389	0,101425378	0,568355868	0,063390861	13,84	50,8	227,2
Bali	2010	0,37	105940,5124	51174,1831	22071,34071	0,19895433	0,10165853	0,573698972	0,064332952	15,31	313,4	278,3
Bali	2011	0,41	110386,8499	81008,25093	30621,41959	0,19086948	0,098458737	0,584054107	0,064446901	18,93	313,4	482,1
Bali	2012	0,43	132445,2987	72377,39047	47779,0792	0,185068894	0,097884404	0,583526399	0,065845629	18,99	3108	482
Bali	2013	0,4	141778,4982	115957,723	56636,92049	0,176957572	0,098539726	0,589513625	0,066632172	19,84	2984,7	390,9
Bali	2014	0,42	14103,2602	103961,4788	62448,22572	0,173498519	0,100511716	0,595125236	0,067815782	23,59	252,8	427,1
Bali	2015	0,38	133343,136	136598,9132	57735,57467	0,168101806	0,101551983	0,601971094	0,067718255	23,75	1250,352	495,847
Bali	2016	0,37	141454,5284	123886,9388	81055,17771	0,163124298	0,09871614	0,607574055	0,067707462	25,36	482,3	450,6
NTB	2007	0,33	195338,5567	12505,22219	76877,71214	0,250840002	0,047040137	0,323721669	0,048811778	14,84	0	5,9
NTB	2008	0,33	202461,9733	13438,19213	68203,95116	0,258555133	0,049726711	0,333234316	0,052340779	14,6	0	14,4
NTB	2009	0,35	186308,2414	13221,9751	52577,10538	0,237681467	0,048214475	0,322772067	0,05065169	14,41	0	2,9
NTB	2010	0,4	188734,4462	18819,53269	47884,33742	0,226457399	0,047035376	0,322371699	0,050224215	15,39	1805,8	220,5
NTB	2011	0,36	216168,2168	32769,31603	71317,03062	0,248147386	0,050123508	0,354415397	0,056659119	16,99	42,3	465,1
NTB	2012	0,35	255832,0298	31155,73239	81861,72074	0,260158393	0,052694239	0,378746312	0,061907966	17,82	45,4	635,8
NTB	2013	0,36	275287,8783	34759,06823	88389,02836	0,25385708	0,051868541	0,383846794	0,063329578	22,64	1398	488,2
NTB	2014	0,38	292100,3877	39544,1902	96663,64251	0,252095753	0,050950075	0,390881148	0,064269747	26,73	212,5	551,1
NTB	2015	0,37	251878,0638	49998,87757	89564,09768	0,221334047	0,043142354	0,339975522	0,057025931	26,84	347,8495	699,377
NTB	2016	0,36	257604,2725	49393,5628	93338,62004	0,21327117	0,042936138	0,342188008	0,058910694	27,79	1342,8	439
NTT	2007	0,35	413607,8424	24560,27307	144212,252	0,39891763	0,015776922	0,469730325	0,034397358	14,42	0	0,4
NTT	2008	0,34	399120,9856	23651,69729	169849,6596	0,395013123	0,015048119	0,47480315	0,034820647	14,38	0	1,4
NTT	2009	0,36	38861,94623	1129,674105	8597,149652	0,387383609	0,015015519	0,482342085	0,035231944	12,56	0	4
NTT	2010	0,38	32239,4426	1725,519372	7586,669643	0,375637755	0,014588648	0,493941327	0,036272321	14,44	0,1	3,8
NTT	2011	0,36	507984,6426	35510,22	170413,7522	0,359245283	0,014264151	0,508981132	0,037509434	17,4	1	5,5

NTT	2012	0,36	571080,484	40194,04853	197073,3127	0,35146743	0,014173228	0,514459556	0,038367931	17,92	14,4	8,7
NTT	2013	0,35	607729,3782	47252,29377	169631,9764	0,341787603	0,01383426	0,52332836	0,039671775	22,88	17,6	9,9
NTT	2014	0,36	645194,4368	52459,78065	208674,2539	0,337034407	0,013556258	0,527532115	0,039377703	26,22	3,6	15,1
NTT	2015	0,34	659705,3296	68699,51036	231981,0026	0,331817344	0,013582447	0,53192797	0,039333784	26,54	1295,674	69,8529
NTT	2016	0,34	667136,0839	71561,34305	310205,6806	0,322484516	0,013556153	0,53587706	0,039850415	26,75	822,2	58,2
Kalbar	2007	0,31	171748,6933	8956,931322	73804,07921	0,254458109	0,185242121	0,424289008	0,054803997	11,03	287	11,2
Kalbar	2008	0,31	175724,0933	10285,33332	85864,21163	0,257152229	0,178905937	0,427894603	0,054375159	10,62	248,1	39,8
Kalbar	2009	0,32	177640,4607	10679,32455	77687,33223	0,252738464	0,173418646	0,415829189	0,054421532	10,71	517,1	27,8
Kalbar	2010	0,37	178036,7005	10790,52927	50454,02013	0,250033003	0,168250825	0,421089109	0,055082508	11,43	1171,7	170,4
Kalbar	2011	0,4	188110,8917	16383,64394	72112,93636	0,246752438	0,162954425	0,426964892	0,055200773	11,94	1404	500,7
Kalbar	2012	0,38	208750,3091	18417,89208	82938,56963	0,241972477	0,158844978	0,431192661	0,055633968	14,17	2811	397,5
Kalbar	2013	0,4	226253,5424	24439,12959	97985,38254	0,244851005	0,156146916	0,429050589	0,055800416	19,27	2522,1	650
Kalbar	2014	0,39	237626,1827	25472,73031	105648,8164	0,238499908	0,154970837	0,432055105	0,056715315	23,18	4320,8	966,1
Kalbar	2015	0,33	237140,7185	29673,21128	103976,9753	0,232949112	0,15289173	0,437761111	0,056525897	23,32	6143,53	1335,72
Kalbar	2016	0,34	243578,5813	30722,24728	123271,9754	0,231277059	0,151792762	0,437008157	0,05716746	24,75	9015,5	630,7
Kalteng	2007	0,3	273876,157	14021,34097	159181,8098	0,348905109	0,082767375	0,378673437	0,047730879	10,49	447	77,6
Kalteng	2008	0,29	279986,1359	12365,8039	165007,0143	0,326796604	0,080832237	0,397465025	0,049264618	11,15	681,9	62,7
Kalteng	2009	0,29	272983,4016	16069,41279	158964,6709	0,319968286	0,079680598	0,39511836	0,052667346	10,16	1464,2	4,9
Kalteng	2010	0,3	259831,7148	18895,91523	125107,3883	0,309189534	0,078759838	0,39635184	0,058551372	11,06	3507,7	546,6
Kalteng	2011	0,34	277044,3804	17659,73524	118569,6864	0,298988591	0,074884161	0,397090329	0,062029794	13,05	3376	543,7
Kalteng	2012	0,33	298794,6537	19377,41181	125056,8833	0,290569561	0,071661998	0,401820728	0,065592904	14,04	4529,6	524,7
Kalteng	2013	0,35	317250,2463	25141,54396	148991,5433	0,279869565	0,068826087	0,405478261	0,068304348	19,89	1835,3	481,6
Kalteng	2014	0,35	326124,4509	25406,60854	148429,9591	0,283368993	0,073115537	0,411290323	0,068836406	22,31	980,4	951
Kalteng	2015	0,33	311532,9713	34755,36752	153924,5214	0,278963356	0,072788096	0,42496251	0,067289576	22,47	1270,119	933,57
Kalteng	2016	0,33	315026,3458	32859,63441	179264,2222	0,27221459	0,073530475	0,426035717	0,067674066	22,72	8179,1	408,2
Kalsel	2007	0,34	128134,5202	14630,32497	67827,3357	0,240876476	0,115577502	0,325167811	0,038847311	11,21	384	59,8
Kalsel	2008	0,33	132175,5155	16188,48983	84795,78154	0,240930671	0,111405067	0,326169681	0,038705469	11,4	592,7	0,2
Kalsel	2009	0,35	129498,3834	13100,32246	78198,63393	0,243941897	0,108667217	0,329684703	0,039584194	11,2	870,9	171,8
Kalsel	2010	0,37	123571,8754	14808,26371	72770,10644	0,235900111	0,105887723	0,335300254	0,040164309	12,18	2015	202,2
Kalsel	2011	0,37	130660,7759	18335,51614	61173,31512	0,231437963	0,102939821	0,340798083	0,040334224	13,62	2118,3	272,1

Kalsel	2012	0,38	145083,6194	17939,49153	75116,72127	0,227704646	0,101298928	0,350478017	0,041292535	16,48	3509,8	272,3
Kalsel	2013	0,36	162196,7239	28413,39258	95089,91496	0,222372638	0,100397834	0,339346889	0,043292076	16,95	8299,2	260,6
Kalsel	2014	0,36	165378,4068	27176,31001	122156,8142	0,221852819	0,099290219	0,347951133	0,043932558	20,36	2616,5	502,5
Kalsel	2015	0,35	160643,7122	39798,89705	112242,3707	0,218907243	0,098958069	0,361448539	0,044472681	20,53	2060,365	961,206
Kalsel	2016	0,33	168009,4567	36244,65811	142763,351	0,217334145	0,100888618	0,370639075	0,04567255	21,89	6163	294,4
Kaltim	2007	0,33	26968,67609	7054,612038	74767,119	0,067601081	0,324700669	0,160693595	0,020480556	14,41	440	152
Kaltim	2008	0,34	25017,08181	5725,501226	108947,1492	0,065635083	0,319513211	0,161704148	0,021481101	14,43	298,7	12,6
Kaltim	2009	0,38	20540,19427	11282,00263	71264,9093	0,065807796	0,299966845	0,168398617	0,022857955	13,97	82,2	79,9
Kaltim	2010	0,37	13357,6169	13378,14828	83422,86512	0,066328785	0,277579879	0,17599899	0,023708821	14,88	7881,3	1092,2
Kaltim	2011	0,38	30296,48756	12828,28427	62143,72688	0,067977509	0,251830898	0,186994551	0,025866856	16,92	6569,1	602,4
Kaltim	2012	0,36	36467,64778	11996,1941	89977,9488	0,068933931	0,227387039	0,196783971	0,029803641	20,33	5889,3	2014,1
Kaltim	2013	0,37	27640,31377	14731,52582	93571,0812	0,071022215	0,215034019	0,206672678	0,033896221	25,04	16034,6	1335,4
Kaltim	2014	0,35	288336,3644	13835,65144	103089,6608	0,074559742	0,212371549	0,217932702	0,03483377	27,34	12859	2145,7
Kaltim	2015	0,32	25013,05073	17829,9866	97515,25821	0,078896703	0,220667657	0,229470215	0,036189202	27,55	9611,313	2381,44
Kaltim	2016	0,32	34345,36249	16592,91249	88557,06321	0,079565648	0,233603302	0,237992679	0,036621817	28,88	6885,1	1139,6
Sulut	2007	0,32	182974,5538	10330,4565	69916,82334	0,213678193	0,079057446	0,430284439	0,057445622	12,09	624	9,7
Sulut	2008	0,28	159363,9815	11305,26739	64094,55817	0,197899635	0,075776632	0,42315432	0,057225506	12,8	42,2	35,5
Sulut	2009	0,31	203640,2703	12565,51942	93084,56513	0,193061224	0,077492711	0,450962099	0,056793003	12,07	49,5	57,7
Sulut	2010	0,37	210740,7941	12860,56364	81163,8454	0,195461718	0,079392719	0,456440115	0,057571965	13,3	95,8	226,8
Sulut	2011	0,39	223401,7436	15867,77769	92741,68947	0,179943245	0,078392622	0,466453836	0,058123036	15,16	331,6	220,2
Sulut	2012	0,43	242242,2973	14183,63132	78107,01945	0,177009442	0,076384648	0,467233523	0,059519895	16,12	678,5	46,7
Sulut	2013	0,42	240152,0655	20328,86165	77507,1731	0,161340736	0,069627802	0,446020975	0,060744396	16,36	66,8	65,7
Sulut	2014	0,42	249714,4999	21273,69888	85851,18307	0,157301194	0,067818943	0,45694466	0,060378236	20,91	83	98,4
Sulut	2015	0,37	240659,9678	29202,01478	101823,8051	0,151919988	0,065593517	0,462585779	0,059096218	21,31	270,6336	87,955
Sulut	2016	0,39	244179,7109	27044,17379	111163,5863	0,148348059	0,062502149	0,468009764	0,06415237	22,82	5069,6	382,8
Sultengah	2007	0,32	222770,217	10238,81276	111090,883	0,419669078	0,063534131	0,355776807	0,038034525	14,19	487,6	7,1
Sultengah	2008	0,33	229702,7701	10232,96026	100973,3076	0,407323719	0,0626703	0,36366053	0,039409849	14,75	0	1,5
Sultengah	2009	0,34	21609,0806	13516,82145	96444,34995	0,410476308	0,064412636	0,312931885	0,039301579	13,43	0	3,3
Sultengah	2010	0,37	217408,762	13571,57256	70143,77374	0,400034041	0,062861682	0,376886418	0,040338137	14,69	153,6	138,5
Sultengah	2011	0,38	219584,3299	14087,23295	73589,85776	0,382233708	0,058832472	0,363028276	0,039525692	16,72	2620,2	370,4

Sultengah	2012	0,4	243770,7514	14203,30593	76379,14499	0,379807692	0,058168317	0,371477532	0,04012757	16,74	602,8	806,5
Sultengah	2013	0,41	256519,6573	20776,90434	84794,37251	0,368310598	0,056094788	0,368572928	0,042060161	21,76	605,3	855
Sultengah	2014	0,37	271629,2047	20263,2652	87407,12109	0,374224959	0,739170238	0,385751737	0,042736465	25,05	95,8	1494,2
Sultengah	2015	0,37	261993,3029	32588,05659	102966,1005	0,344440042	0,677028925	0,357840135	0,039407802	25,13	968,4476	1085,16
Sultengah	2016	0,36	259415,7286	29457,68362	118384,6205	0,32066944	0,665280189	0,344381489	0,039793011	25,57	1081,2	1600,3
Sulsel	2007	0,37	164524,7451	14998,89655	74433,76674	0,294735314	0,138899642	0,349366109	0,059735798	15,99	1,1	62,8
Sulsel	2008	0,36	166988,1504	14878,66321	87532,78891	0,290078563	0,140089787	0,355712682	0,061144781	16,08	1105,2	27,9
Sulsel	2009	0,39	160932,3225	16071,52631	77170,48208	0,285868233	0,136690191	0,365697502	0,063854963	15,79	1137,8	77
Sulsel	2010	0,4	156003,551	19035,6849	54710,62322	0,270410156	0,134160156	0,372167969	0,069179688	18,64	3212,3	441,8
Sulsel	2011	0,41	163369,5201	19328,6492	59320,78767	0,267376671	0,134150988	0,38008237	0,074006205	21,46	3986,3	89,6
Sulsel	2012	0,41	184812,3039	21629,45715	57836,32613	0,260105831	0,134800228	0,383251281	0,079440035	23,17	2318,9	582,6
Sulsel	2013	0,43	197021,0095	27930,87076	58603,08	0,251151142	0,135399166	0,382754651	0,084515587	27,8	921	462,8
Sulsel	2014	0,42	201536,5153	29346,6919	72069,34399	0,256958107	0,137238167	0,375867955	0,083989122	30,23	4949,6	280,9
Sulsel	2015	0,42	197672,3315	39101,70963	87116,51751	0,253698504	0,136750175	0,377679391	0,084174721	30,64	9215,327	233,347
Sulsel	2016	0,43	200415,0267	46441,09356	105976,9363	0,255278239	0,137711758	0,378210928	0,086123259	31,49	3334,6	372,5
Sultenggara	2007	0,35	298299,4428	15288,64038	141208,3184	0,35394342	0,089477068	0,362408916	0,051007287	16,09	2768,9	0
Sultenggara	2008	0,33	300636,1416	13892,49605	144292,3433	0,346618719	0,088602537	0,37149136	0,052941764	16,08	0	0,5
Sultenggara	2009	0,36	329074,2684	18430,58501	152350,9806	0,331042808	0,077630235	0,392144117	0,052743987	16,45	0	3,6
Sultenggara	2010	0,42	316353,8405	26402,65777	123917,5787	0,309957082	0,087982833	0,390214592	0,055536481	18,28	19,2	14
Sultenggara	2011	0,41	328377,8194	20930,37079	124902,9701	0,29244985	0,086163323	0,389353973	0,060495972	21,48	59	17
Sultenggara	2012	0,4	364323,8835	25452,66312	122271,4909	0,27489301	0,079671897	0,387018545	0,060627675	23,62	907,3	35,7
Sultenggara	2013	0,43	384835,8854	25288,76245	149325,8504	0,268798617	0,077787381	0,390133635	0,064024998	24	1261,6	86,4
Sultenggara	2014	0,41	397369,6817	37639,54956	175083,411	0,276498561	0,078838694	0,403641597	0,065073207	28,78	1249,9	161,8
Sultenggara	2015	0,4	399555,8849	35174,3746	215608,4179	0,258810444	0,079440347	0,405807283	0,064746517	28,89	2015,402	145,01
Sultenggara	2016	0,4	447551,2124	39873,0454	288863,819	0,261803991	0,081240037	0,420106634	0,066234266	29,31	1794,2	372,5
Gorontalo	2007	0,39	482806,3275	35318,351	194730,9607	0,306113724	0,081658829	0,431808465	0,085506627	12,82	0	0
Gorontalo	2008	0,34	479034,7346	40851,02301	260168,2027	0,307021023	0,080126934	0,431178104	0,08488695	13,01	0	0
Gorontalo	2009	0,35	537096,4589	45079,48359	270190,8274	0,295462929	0,077093323	0,438583549	0,086315013	11,1	0	0
Gorontalo	2010	0,43	515229,7	47885,37676	197921,855	0,285910182	0,077819678	0,442920809	0,087418581	12,87	16,7	0,8
Gorontalo	2011	0,46	538943,6122	54983,0382	220883,9917	0,281757402	0,078000637	0,444762814	0,087870105	19,85	11,8	12,5

Gorontalo	2012	0,44	603152,5839	51342,15366	189415,284	0,276595745	0,079196217	0,445921986	0,089243499	20,46	164,9	35,3
Gorontalo	2013	0,44	637159,7757	53814,40362	204523,2051	0,271730189	0,080614203	0,447216891	0,09048533	23,27	84,4	25,7
Gorontalo	2014	0,41	669392,9415	80132,47367	223240,3995	0,273261759	0,079498978	0,450664622	0,089212679	27,94	45,1	4,1
Gorontalo	2015	0,42	657385,1776	93926,0296	234273,8368	0,26811071	0,078459687	0,453188929	0,091937425	28,38	94,306	6,9213
Gorontalo	2016	0,42	692727,7612	95752,93041	278296,8818	0,267962042	0,078400362	0,451197469	0,100316313	28,98	2202,5	12,7
SulawesiBarat	2007	0,31	333832,0827	13418,52326	152926,792	0,516255605	0,078195067	0,308015695	0,053251121	10,07	0	0
SulawesiBarat	2008	0,31	330465,6164	13875,46887	133858,2146	0,479369842	0,073268317	0,302075519	0,068517129	10,2	0	0
SulawesiBarat	2009	0,3	324840,0878	11139,89785	133694,0974	0,462137297	0,085161595	0,321538099	0,073602265	9,1	0	0
SulawesiBarat	2010	0,36	305471,8059	17130,02382	75146,11467	0,47301855	0,087900506	0,309443508	0,069350759	10,47	840	37,3
SulawesiBarat	2011	0,34	312545,9011	12746,25048	102238,0998	0,4620084	0,091828942	0,319778541	0,064719359	13,03	218,6	5,6
SulawesiBarat	2012	0,31	350766,031	16401,34748	116445,9776	0,45371669	0,089060309	0,332924264	0,063113604	14,65	228,6	0,2
SulawesiBarat	2013	0,35	377930,7139	19525,76705	133655,7502	0,447079993	0,088663504	0,335841649	0,064943563	18,04	685,1	2,5
SulawesiBarat	2014	0,35	379115,4865	21903,31335	127520,7774	0,435076646	0,110459874	0,328223625	0,061767358	21,53	690,1	16,3
SulawesiBarat	2015	0,36	392396,0873	35927,25777	187053,7316	0,428351525	0,114329695	0,33011475	0,060873216	21,97	1103,796	2,0266
SulawesiBarat	2016	0,36	425671,3506	38228,89374	199567,6922	0,319429778	0,104144667	0,330121436	0,062565998	22,36	84,1	20,6
Maluku	2007	0,33	635189,5813	22026,12166	249167,1748	0,323699422	0,04954583	0,546105147	0,054775667	17,7	0	0
Maluku	2008	0,31	665724,8165	30621,50647	390604,0277	0,319514127	0,049643517	0,55030367	0,054924743	18,13	0	0
Maluku	2009	0,31	630393,8823	41885,46281	339428,2372	0,315301778	0,05058853	0,5549712	0,054345104	19,24	0	0
Maluku	2010	0,33	707366,7469	40395,04422	299380,4625	0,312867561	0,047518231	0,556810162	0,052223006	21,88	0	2,9
Maluku	2011	0,41	757383,4449	32936,99068	284914,436	0,305746616	0,048147326	0,563345906	0,051031728	26,71	0,1	11,7
Maluku	2012	0,38	842073,136	32004,88295	259197,1181	0,299938284	0,048138243	0,570458753	0,049578276	28,98	3,4	8,5
Maluku	2013	0,37	900572,1644	36754,07318	260900,2659	0,297006457	0,048522794	0,573664645	0,04871845	33,8	0	52,8
Maluku	2014	0,35	970617,9046	42952,04257	313260,0459	0,295412844	0,049174312	0,568990826	0,048623853	36,44	0	13,1
Maluku	2015	0,34	958263,6054	69132,32933	388263,6919	0,283576896	0,048538622	0,582115518	0,049234516	36,6	0	82,3909
Maluku	2016	0,35	10239331,72	67173,1242	503228,0308	0,280967264	0,049185721	0,583648626	0,050501727	37,51	11,4	102,6
MalukuUtara	2007	0,33	711053,8984	27747,82327	435983,9296	0,347860856	0,148340664	0,399840064	0,033186725	15,72	0	0
MalukuUtara	2008	0,33	727156,5937	51193,15504	509238,9959	0,358732554	0,127876273	0,407770653	0,034326669	16,6	0	0
MalukuUtara	2009	0,33	682320,67	41150,09139	456189,1447	0,354196302	0,125533428	0,420697013	0,035561878	15,67	0	5,9
MalukuUtara	2010	0,34	681112,3883	103430,1166	369704,1604	0,345520422	0,122529644	0,428194993	0,035243742	17,04	0	246
MalukuUtara	2011	0,33	787119,9647	82037,8774	358676,1471	0,338390093	0,118885449	0,438390093	0,03622291	19,33	13,5	129,8

MalukuUtara	2012	0,34	8457618,319	68033,24447	418056,3151	0,311050477	0,107230559	0,428376535	0,034106412	21,79	320,5	90,3
MalukuUtara	2013	0,32	912797,9338	90607,48112	386794,5114	0,300827729	0,107087429	0,445421624	0,034661148	26,42	1114,9	268,5
MalukuUtara	2014	0,32	962416,8986	91165,84739	426012,0992	0,292052657	0,110921502	0,465138957	0,034129693	30,85	156,3	98,7
MalukuUtara	2015	0,28	1047740,307	79777,49403	475724,3295	0,279641544	0,108915441	0,471966912	0,035386029	31,25	48,23	203,828
MalukuUtara	2016	0,29	1079273,491	86208,76993	568293,3128	0,275907017	0,118401043	0,473604171	0,037801434	31,75	8,8	438,9
PapuaBarat	2007	0,3	454243,9505	18776,56623	315162,2642	0,288001348	0,137175598	0,2842939	0,018874284	13,13	0	2
PapuaBarat	2008	0,31	450082,2091	11846,76047	348730,675	0,28390625	0,13625	0,286875	0,024375	14,7	0	0,9
PapuaBarat	2009	0,35	387318,3107	23134,20941	317293,7524	0,260326609	0,187731577	0,282283519	0,024564293	12,72	0	1
PapuaBarat	2010	0,38	297990,0365	14213,31081	172526,0115	0,21481956	0,321481956	0,244928465	0,020286141	14,66	51,3	17,2
PapuaBarat	2011	0,4	301486,7576	12871,55371	184742,2048	0,171701913	0,416079221	0,224991608	0,01728768	16,46	47,2	33,1
PapuaBarat	2012	0,43	319250,5516	17593,3603	180510,1618	0,15065312	0,459651669	0,216400581	0,016182874	20,03	45,8	32
PapuaBarat	2013	0,43	329292,047	18397,05723	200207,9069	0,142676935	0,471783296	0,21763378	0,010158014	24,1	304	54,2
PapuaBarat	2014	0,44	346164,8223	20753,72965	196469,4544	0,142137097	0,465347782	0,224861391	0,010521673	29,66	100	153,4
PapuaBarat	2015	0,44	371273,5076	28056,47692	275024,0093	0,139979433	0,456233743	0,232411832	0,010888633	29,66	63,4476	258,608
PapuaBarat	2016	0,37	379467,1258	34349,12953	272587,7141	0,136763514	0,450804491	0,240305591	0,01105452	31,45	10,6	514,5
Papua	2007	0,41	365910,1039	13848,9749	210176,3886	0,170104167	0,02484375	0,202760417	0,021822917	15,88	0	0,4
Papua	2008	0,4	377032,5396	12618,44132	225202,3358	0,181597296	0,025670822	0,228660469	0,025882104	15,68	294,7	17,8
Papua	2009	0,38	349003,4312	19611,7724	202748,3398	0,15405569	0,022310619	0,2218523	0,030958146	12,45	41	1,8
Papua	2010	0,41	442230,5754	29421,98768	236634,5762	0,165126969	0,024947561	0,259383228	0,033917972	13,18	178	329,6
Papua	2011	0,42	552925,9323	25907,52153	296110,1436	0,182136437	0,027864509	0,303954963	0,038887312	12,81	1378,9	1312
Papua	2012	0,44	624219,374	31982,99641	318725,4785	0,189867513	0,028130248	0,328232879	0,040912484	13,86	54,7	1202,4
Papua	2013	0,44	637612,8558	29454,68599	286742,1219	0,173782346	0,025023358	0,318072876	0,041881627	17,5	584,3	2360
Papua	2014	0,41	699204,5763	31561,53931	344201,1242	0,177118445	0,026220898	0,337461786	0,043544721	22,48	249,9	1260,6
Papua	2015	0,42	673832,1489	38152,27388	375293,11	0,174720105	0,02530907	0,34054192	0,042376281	22,55	1275,222	897,049
Papua	2016	0,39	667871,2445	42361,69271	402667,3445	0,163527683	0,024243639	0,335103186	0,041307687	23,75	220,5	1168,4

Lampiran 2 Hasil Regresi Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.336679	0.013272	25.36827	0.0000
PAD?	1.76E-07	1.30E-07	1.351162	0.1776
DAU?	-1.59E-09	3.00E-09	-0.532298	0.5949
BM?	2.89E-08	2.37E-08	1.218575	0.2239
PP?	-0.075344	0.027940	-2.696619	0.0074
PM?	-0.020884	0.019507	-1.070615	0.2852
PJ?	-0.070376	0.026495	-2.656187	0.0083
PK?	0.617321	0.111120	5.555434	0.0000
PMA?	1.24E-05	2.91E-06	4.258346	0.0000
PMDN?	9.13E-08	4.48E-07	0.203747	0.8387
TP?	0.001268	0.000295	4.303825	0.0000

R-squared	0.287316	Mean dependent var	0.357375
Adjusted R-squared	0.264252	S.D. dependent var	0.041067
S.E. of regression	0.035226	Akaike info criterion	-3.820318
Sum squared resid	0.383420	Schwarz criterion	-3.690782
Log likelihood	622.2508	Hannan-Quinn criter.	-3.768591
F-statistic	12.45725	Durbin-Watson stat	0.487056
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah Data Eviews 8

Lampiran 3 Estimasi Hasil Regresi Random Effect

Dependent Variable: INDEKS_GINI?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 11/14/17 Time: 17:31
Sample: 1 10
Included observations: 10
Cross-sections included: 32
Total pool (balanced) observations: 320
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.347863	0.022118	15.72777	0.0000
PAD?	1.52E-07	1.48E-07	1.029034	0.3043
DAU?	8.03E-12	2.26E-09	0.003558	0.9972
BM?	-3.07E-08	2.46E-08	-1.250282	0.2121
PP?	-0.121853	0.050694	-2.403702	0.0168
PM?	-0.008351	0.024264	-0.344149	0.7310
PJ?	-0.032545	0.052517	-0.619701	0.5359
PK?	0.413308	0.206069	2.005676	0.0458
PMA?	6.94E-06	2.96E-06	2.343258	0.0198
PMDN?	3.74E-07	4.10E-07	0.910961	0.3630
TP?	0.001393	0.000408	3.411153	0.0007
Random Effects (Cross)				
ACEH--C	-0.034799			
BALI--C	-0.000157			
BANTEN--C	0.007960			
BENGKULU--C	0.018272			
DIY--C	-0.013269			
GORONTALO--C	0.040623			
JAMBI--C	-0.020458			
JAWABARAT--C	0.000772			
JAWATENGAH--C	0.002869			
JAWATIMUR--C	-0.010561			
KALBAR--C	0.002274			
KALSEL--C	0.003169			
KALTENG--C	-0.023846			
KALTIM--C	-0.025589			
KEPBABEL--C	-0.047544			
KEPRIAU--C	-0.033671			
LAMPUNG--C	0.011585			
MALUKU--C	-0.000307			
MALUKUUTARA--C	-0.015511			
NTB--C	-0.002948			
NTT--C	0.021137			
PAPUA--C	0.049609			
PAPUABARAT--C	0.036014			
RIAU--C	-0.009357			
SULAWESIBARAT--C	0.005620			
SULSEL--C	0.031297			
SULTENGAH--C	0.027189			
SULTENGGARA--C	0.033824			
SULUT--C	0.009813			
SUMBAR--C	-0.029013			
SUMSEL--C	-0.002701			

SUMUT--C	-0.032295		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.025112	0.4882
Idiosyncratic random		0.025712	0.5118
Weighted Statistics			
R-squared	0.238554	Mean dependent var	0.110089
Adjusted R-squared	0.213911	S.D. dependent var	0.029650
S.E. of regression	0.026288	Sum squared resid	0.213542
F-statistic	9.680670	Durbin-Watson stat	0.842779
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.230038	Mean dependent var	0.357375
Sum squared resid	0.414236	Durbin-Watson stat	0.434459